

**PENGUKURAN KINERJA DENGAN MENGGUNAKAN METODE
VALUE FOR MONEY PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA
MARGA KABUPATEN EMPAT LAWANG**

SKRIPSI



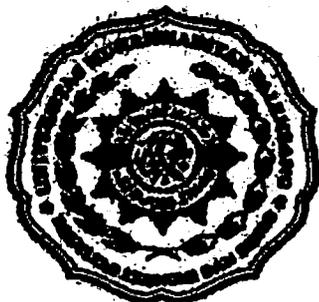
**Nama : Sri Megawati
Nim : 22 2010 196**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2014**

**PENGUKURAN KINERJA DENGAN MENGGUNAKAN METODE
VALUE FOR MONEY PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Nama : Sri Megawati
Nim : 22 2010 196**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2014**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Megawati

NIM : 22 2010 196

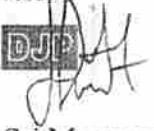
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dan segala konsekuensinya.

Palembang, 7 Juli 2014

METERAI
TEMPEL
PAJAK PERBANGSAAN DAN CUKAI
TGL. 20
1FD36AAF497779656
ESKANSI RIBU RUPIAH


Sri Megawati

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengukuran Kinerja dengan Menggunakan Metode
Value for Money pada Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga Kabupaten Empat Lawang
Nama : Sri Megawati
Nim : 22 2010 196
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disyahkan
Pada tanggal, September 2014
Dosen Pembimbing



(Muhammad Fahmi, S.E., M.Si)
NIDN: 0029097804

Mengetahui
Dekan
U.b Ketua Program Studi Akuntansi



(Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si)
NIDN/NBM0228115802/1021961

MOTTO

“Sesungguhnya masa lalu adalah guru bagi kita untuk menatap dan membangun masa depan. Jadi, lakukanlah sesuatu dengan sungguh-sungguh dan ikhlas.”

(Sri Megawati)

Kupersembahkan kepada:

- ❖ Kedua Orang Tuaku**
- ❖ Saudara-saudaraku Tersayang**
- ❖ Sahabat-sahabat Terbaikku**
- ❖ Almamater**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulisan skripsi ini yang berjudul Pengukuran Kinerja dengan Menggunakan Metode *Value for Money* pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang dapat penulis selesaikan tepat waktu.

Dalam skripsi ini, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui pengukuran kinerja dengan menggunakan metode *value for money* pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang. Laporan penelitian ini dibagi menjadi 5 Bab berturut-turut, Bab Pendahuluan, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Hasil Pembahasan dan Analisa serta Simpulan dan Saran.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku bapak **Guntoro** dan ibu **Neta Noviani** serta adik-adikku tersayang yang telah mendidik, membiayai, dan memberikan doa dan semangat kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak **Muhammad Fahmi, S.E., M.Si** yang telah membimbing, memberikan pengarahan dan saran-saran yang sangat membangun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam penyelesaian studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak DR. H.M. Idris, S.E, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta karyawan / karyawan.
2. Bapak Abid Djazuli, S.E., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang beserta karyawan / karyawan.
3. Ibu Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si dan Ibu Welly, S.E., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Kedua orang tuaku : Guntoro dan Neta Noviani yang selalu memberikan dorongan baik berupa materil dan spiritual, terima kasih atas ketabahan dan kesabaran dengan segala saran dan do'a restunya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Keluarga besarku dan saudara-saudaraku (Handoyo dan Handoko) yang selalu memberikan semangat dan do'a untukku.
6. Pimpinan beserta staf bagian Akademik Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Pimpinan beserta staf karyawan/ti Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang.
8. Sahabat-sahabat terbaikku.
9. Teman seperjuangan

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, 7 Juli 2014

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, positioned above the printed name.

Sri Megawati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	iv
HALAMAN PRAKATA.....	v
HALAMAN DAFTAR ISI	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL	xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xiv
HALAMAN LAMPIRAN	xv
HALAMAN ABSTRAK.....	xvi
HALAMAN ABSTRACT.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya.....	7
B. Landasan Teori.....	9
1. Kinerja	9
a. Definisi Kinerja.....	9
2. Pengukuran Kinerja	13
a. Definisi Pengukuran Kinerja.....	13
b. Tujuan Pengukuran Kinerja	14
c. Manfaat Pengukuran Kinerja	15
d. Indikator Kinerja Dalam Pengukuran Kinerja	16
e. Prinsip-Prinsip Pemilihan Ukuran Kinerja.....	17
3. Pengukuran Kinerja dengan Menggunakan Metode <i>Value For Money</i>	20
a. Pengertian <i>Value For Money</i>	20
b. Tujuan <i>Value For Money</i>	21
c. Langkah-Langkah Pengukuran <i>Value For Money</i>	20

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	25
B. Lokasi Penelitian.....	26
C. Operasionalisasi Variabel	26
D. Populasi dan Sampel	26
E. Data yang Digunakan.....	27
F. Metode Pengumpulan Data.....	28
G. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	32
1. Sejarah Singkat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang	32
2. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang	33
3. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas.....	34
B. Pembahasan	58
1. Tingkat Ekonomis.....	58

2. Tingkat Efisien.....	62
3. Tingkat Efektivitas.....	64
4. <i>Outcome</i>	67

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.....	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel I.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang.....	4
Tabel I.2	Realisasi Anggaran APBD pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang.....	4
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel.....	26
Tabel IV.1	Realisasi Anggaran APBD pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang.....	57
Tabel IV.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang.....	58
Tabel IV.3	Hasil Perhitungan Tingkat Ekonomis.....	62
Tabel IV.4	Hasil Perhitungan Tingkat Efisiensi.....	64
Tabel IV.5	Hasil Perhitungan Tingkat Efektivitas.....	66
Tabel IV.6	Pertanyaan Mengenai Dampak Pembangunan Jalan Tahun 2011.....	69
Tabel IV.7	Pertanyaan Mengenai Dampak Pembangunan Jalan Tahun 2012.....	70
Tabel IV.8	Pertanyaan Mengenai Dampak Pembangunan Jalan Tahun 2013.....	72
Tabel IV.9	Pertanyaan Mengenai Dampak Pembangunan Jembatan Tahun 2011.....	73
Tabel IV.10	Pertanyaan Mengenai Dampak Pembangunan Jembatan	

	Tahun 2012.....	75
Tabel IV.11	Pertanyaan Mengenai Dampak Pembangunan Jembatan	
	Tahun 2013.....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
Gambar II.1	Siklus Pengukuran Kinerja.....	19
Gambar IV.1	Struktur Organisasi.....	36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner

Lampiran 2 Surat Keterangan Riset

Lampiran 3 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi

Lampiran 4 Sertifikat Membaca dan Menghafal Al-Qur'an (Surat Pendek)

Lampiran 5 Sertifikat Toefl

Lampiran 6 Sertifikat KKN

Lampiran 7 Biodata Penulis

ABSTRAK

Sri Megawati/222010196/2014/Pengukuran Kinerja dengan Menggunakan Metode *Value for Money* pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah pengukuran kinerja dengan menggunakan metode *value for money* pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengukuran kinerja dengan penerapan metode *value for money* pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Variabel yang digunakan adalah pengukuran kinerja dengan penerapan metode *value for money*. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Metode yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan untuk tingkat ekonomis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang belum berhasil dalam mengelola belanja tidak langsung. Untuk tingkat efisiensi mampu mencapai hasil yang cukup baik. Untuk tingkat eektivitas belum mencapai hasil yang cukup baik di karenakan masih ada program yang belum tercapai. Dan untuk pengukuran outcome masih kurang karena di dasari tingkat kepuasan masyarakat yang belum maksimal.

Kata kunci: Pengukuran Kinerja, *Value for Money*

ABSTRACT

Sri Megawati / 222010196/2014 / Performance Measurement Method Using Value for Money to the Public Works Department of Highways District Empat Lawang.

Formulation of the problem of this research is how to use the method of performance measurement value for money on the Public Works Department of Highways District Empat Lawang. The purpose of this study is to investigate the application of the method of performance measurement with value for money on the Public Works Department of Highways District Empat Lawang.

This research is a descriptive study. Variables used with the application of the method of performance measurement value for money. The data used are primary data and secondary data. Data pengumpulan techniques are interviews, documentation, and questionnaires. The method used is qualitative data and quantitative data.

The results of this study show for the economics Public Works Department of Highways District Empat Lawang has not succeeded in managing indirect spending. Efficiency levels are able to achieve good results. For the Effectiveness has not reached the level of good results in because there are programs that have not been reached. And for the measurement of outcomes is still lacking due to the underlying level of community satisfaction is not maximized.

Keywords: Performance Measurement, Value for Money

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kinerja yang baik sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dalam suatu organisasi. Untuk menghasilkan kinerja yang baik diperlukan serangkaian proses manajemen kinerja yang dimulai dari merencanakan kinerja sampai mengevaluasi kinerja. Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat kontrol organisasi yang bertujuan untuk memotivasi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi (Indra, 2006: 326).

Pada sektor publik pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.(Mardiasmo, 2009: 121).

Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi, Saat ini terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan milik lembaga atau daerah, dan berbagai organisasi publik lainnya dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas oleh lembaga-lembaga sektor

publik. Tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Organisasi sektor publik tengah menghadapi tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas aktifitas yang dilakukan.

Berbagai fenomena dan tuntutan yang ada sektor publik perlu suatu alat pengendalian organisasi yaitu metode pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, memperbaiki pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, serta untuk memfasilitasi terwujudnya akuntabilitas publik. Metode *Value For Money* adalah metode pengukuran kinerja yang tepat untuk itu.

Menurut Mardiasmo (2009:4), *Value For Money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang didasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi yaitu pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Efisiensi yaitu pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output* dan *input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas yaitu tingkat pencapaian hasil program

dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektifitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.

Suatu instansi pemerintah dianggap berhasil apabila dapat menyerap 100% anggaran dari pemerintah, walaupun hasil yang dicapai dari pelaksanaan anggaran tersebut masih berada dibawah standar. Oleh karena itu pentingnya disusun suatu sistem pengukuran kinerja yang dapat memberikan informasi atas ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas dalam pencapaian kinerja suatu organisasi pemerintah atau organisasi sektor publik. Melalui pengukuran kinerja diharapkan instansi pemerintah dapat mengetahui kinerja dalam suatu periode tertentu sehingga kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi dengan suatu pengukuran kinerja.

Badan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang merupakan instansi pemerintah yang bergerak di bidang pekerjaan umum. Organisasi sektor publik tengah menghadapi tekanan untuk lebih ekonomis, efektif, dan efisien dalam memperhitungkan biaya ekonomi serta dampak negatif dari aktivitas yang dilakukan karena akan berdampak pada pengeluaran yang cukup besar dalam anggaran belanja rutin.

Pengukuran kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang hanya membandingkan anggaran belanja dan realisasinya. Sehingga apabila realisasi belanja lebih besar dari pada anggaran yang ditetapkan maka dinyatakan tidak berhasil, sebaliknya apabila realisasi belanja lebih kecil dari pada anggaran yang ditetapkan maka dinyatakan berhasil.

Fenomena yang terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang yaitu kinerja instansi tersebut dalam pelaksanaan anggaran yang diberikan pemerintah pusat masih kurang maksimal maksudnya, masih terdapat ketidakekonomisan, ketidak efisienan, dan ketidak efektifan dalam penggunaan anggaran mereka, itu dilihat dari data yang ada.

Tabel I.1
Anggaran dan Realisasi Belanja pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang Tahun 2011-2013

Uraian	Anggaran	Realisasi
Tahun 2011		
Belanja Langsung	57.886.597.845	39.365.038.356
Belanja Tidak Langsung	44.654.528	43.915.833
Total Belanja	57.931.252.373	39.408.954.189
Tahun 2012		
Belanja Langsung	138.962.526.400	108.549.038.230
Belanja Tidak Langsung	1.310.902.400	1.749.131.982
Total Belanja	140.273.428.800	110.298.170.212
Tahun 2013		
Belanja Langsung	197.090.486.655	136.227.550.236
Belanja Tidak Langsung	1.138.853.098	1.510.239.654
Total Belanja	198.229.339.753	137.737.789.890

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang, 2014

Tabel I.2
Realisasi Anggaran APBD pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang Tahun 2011-2013

Tahun	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
2011	57.931.252.373	39.408.954.189	68,02 %
2012	140.273.428.800	110.298.170.212	78,63 %
2013	198.229.339.753	137.737.789.890	69,48 %

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang, 2014

Sistem pengukuran kinerja dengan menggunakan metode value for money ini, mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian tentang

bagaimana metode *value for money* menggabungkan ukuran finansial dan non-finansial dalam mengukur kinerja pelaksanaan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang. Berdasarkan informasi dari bagian keuangan pada instansi tersebut berkaitan dengan anggaran belanja, bahwa terlihat adanya ketidakberhasilan dalam penggunaan anggaran belanja tidak langsung mereka pada tahun 2012 dan 2013. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengukuran Kinerja dengan Menggunakan Metode *Value For Money* Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengukuran kinerja dengan menggunakan metode *value for money* pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengukuran kinerja dengan menggunakan metode *value for money* pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut:

a. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis tentang penilaian kinerja organisasi pemerintah atau sektor publik melalui pengetahuan penulis yang di peroleh selama di bangku kuliah.

b. Bagi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang

Sebagai masukan positif bagi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang untuk mengambil kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dinas pemerintahan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam penyusunan anggaran.

c. Bagi Almamater

Sebagai bahan referensi dan kerangka acuan yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

BAB II **KAJIAN PUSTAKA**

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya berjudul Analisis Pengukuran Kinerja dalam Rangka Penerapan Metode *Value for Money* pada Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang yang telah dilakukan oleh Deny (2012). Perumusan masalahnya yaitu bagaimana pengukuran kinerja dalam rangka penerapan metode *value for money* pada Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang. Data yang digunakan adalah data primer dan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh antara lain Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang dalam melakukan pengeluaran untuk memperoleh pendapatan dalam hal melaksanakan kegiatannya telah dilakukan secara ekonomis dan dalam hal tingkat pencapaian kegiatannya telah dilakukan secara efisien, namun dalam melakukan pengeluaran untuk memperoleh pendapatan dalam hal tingkat pencapaian kegiatannya telah dilakukan secara tidak efektif. Persamaan penelitian sebelumnya dengan sekarang yaitu sama-sama meneliti tentang pengukuran kinerja. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu jika penelitian sebelumnya meneliti tentang analisis pengukuran kinerja dalam rangka penerapan metode *value for money* pada Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang, sedangkan pada penelitian sekarang meneliti tentang pengukuran kinerja dengan penerapan metode *value*

for money pada dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang.

Penelitian sebelumnya juga telah dilakukan yang berjudul Pengukuran Kinerja Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja dengan Konsep 3E (*Value For Money*) Pada Kementrian Agama Kabupaten Musi Rawas yang telah dilakukan oleh Lingga (2012). Perumusan masalahnya yaitu bagaimana kinerja atas pelaksanaan anggaran belanja dengan konsep 3E (*value for money*) pada Kementrian Agama Kabupaten Musi Rawas. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui kinerja atas pelaksanaan anggaran belanja dengan konsep 3E (*value for money*) pada Kementrian Agama Kabupaten Musi Rawas. Variabel yang digunakan adalah pengukuran kinerja anggaran operasional Kementrian Agama Kabupaten Musi Rawas. Data yang digunakan adalah data primer dan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam penggunaan biaya operasional dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan manajemen publik pada kantor Kementrian Agama Kabupaten Musi Rawas.

Perbandingan hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat dilakukan dengan melihat persamaan sekarang dengan yang sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang pengukuran kinerja, sedangkan perbedaannya dalam penelitian sebelumnya membahas tentang kinerja atas pelaksanaan anggaran belanja dengan konsep 3E (*value for money*) pada Kementrian Agama Kabupaten Musi Rawas, sedangkan dalam penelitian ini meneliti

tentang pengukuran kinerja dengan penerapan metode *Value For Money* Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang.

B. Landasan Teori

1. Kinerja

a. Definisi Kinerja

Menurut Mahsun (2006: 25), kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok tersebut mempunyai kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang harus dicapai. Tanpa ada tujuan atau target kinerja seseorang atau organisasi mungkin tidak dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Pengertian lainnya mengenai kinerja menurut Indra (2006: 274), yaitu gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategi suatu organisasi. Secara umum dapat dicapai oleh organisasi pada waktu tertentu.

Dari kedua pernyataan tersebut maka penulis menyimpulkan kinerja adalah gambaran pelaksanaan pencapaian suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Keberhasilan pencapaian kegiatan itu bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok tersebut mempunyai tingkat keberhasilan berupa target-target yang harus dicapai, Tanpa ada tujuan atau target kinerja seseorang atau organisasi mungkin tidak dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

1) Indikator Kinerja

Menurut Indra (2001: 337), indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan beberapa indikator berikut:

(a) Indikator Masukan

Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan menghasilkan keluaran. Indikator ini berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan perundang-undang dan sebagainya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumber daya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategi yang diterapkan. Tolak ukur ini dapat pula digunakan untuk perbandingan dengan lembaga-lembaga relevan.

(b) Indikator Proses

Dalam indikator proses organisasi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Rambu yang paling dominan dalam proses

adalah tingkat efisien dan ekonomis pelaksanaan organisasi. Efisien berarti besarnya hasil yang diperoleh dengan pemanfaatan jumlah input. Sedangkan yang dimaksud dengan ekonomis adalah bahwa suatu kegiatan dilaksanakan lebih murah dibandingkan dengan standar biaya dan waktu yang telah ditentukan.

(c) Indikator Keluaran

Indikator keluaran adalah suatu yang diharapkan atau yang ingin dicapai dari suatu kegiatan fisik dan non fisik, dengan membandingkan keluaran indikator pengeluaran dijadikan landasan untuk menganalisis apakah kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana.

(d) Indikator Hasil

Indikator hasil adalah sesuatu yang berkaitan dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator hasil lebih utama dari sekedar keluaran. Hasil menggambarkan tingkat kepentingan banyak pihak. Dengan indikator hasil, organisasi dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

(e) Indikator Manfaat

Indikator manfaat adalah bentuk yang terkait dengan tujuan akhir pelaksanaan kegiatan atau menggambarkan manfaat yang telah diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu kemudian. Khususnya dalam jangka

menengah dan jangka panjang. Indikator manfaat menunjukkan hal yang diharapkan dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal.

2) Fungsi dan Manfaat Indikator Kinerja

Menurut Mardiasmo (2009: 128), indikator kinerja bagi pemerintah memiliki fungsi atau peranan sebagai berikut:

- (a) Untuk membantu memperjelas tujuan organisasi.
- (b) Untuk mengevaluasi target akhir (*final outcome*) yang dihasilkan.
- (c) Sebagai masukan untuk menentukan skema insentif manajerial.
- (d) Memungkinkan bagi pengguna jasa layanan pemerintah untuk melakukan pilihan.
- (e) Untuk menunjukkan standar kinerja.
- (f) Untuk menunjukkan efektivitas.
- (g) Untuk membantu menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang paling baik untuk mencapai target sasaran.
- (h) Untuk menunjukkan wilayah, bagian, atau proses yang masih potensial untuk dilakukan penghematan biaya.

Menurut Indra Bastian (2006: 129), manfaat dari indikator kinerja adalah sebagai berikut:

- (a) Memberikan kejelasan tujuan organisasi.
- (b) Mengembangkan persetujuan pengukuran aktivitas.
- (c) Keuntungan lebih tinggi atas proses produksi.

- (d) Memberikan fasilitas setting of target untuk organisasi dan manajer.

2. Pengukuran Kinerja

a. Definisi Pengukuran Kinerja

Menurut Mardiasmo (2009: 121), penilaian kinerja merupakan bagian dan proses pengendalian manajemen yang dapat dilakukan sebagai alat pengendalian. Pengendalian manajemen melalui sistem penilaian dilakukan dengan cara menciptakan mekanisme reward. Penilaian kinerja dapat juga dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Menurut Indra (2006: 329), pengukuran kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses.

Dari kedua pernyataan tersebut maka penulis menyimpulkan pengukuran kinerja adalah bagian dan proses pengendalian manajemen yang dapat dilakukan sebagai alat pengendalian dalam arah pencapaian misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses.

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik memicu timbulnya gejala yang berakar pada ketidakpuasan, tuntutan yang semakin tinggi terhadap pertanggung

jawaban yang di berikan kepada mereka. Dengan kata lain, kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan, karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah.

Kondisi ini mendorong peningkatan kebutuhan adanya suatu pengukuran kinerja terhadap para penyelenggara negara yang telah menerima amanat dari rakyat. Pengukuran tersebut akan melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk memotivasi personal dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan oleh organisasi. Standar perilaku dapat berupa kegiatan manajemen atas manfaat formal yang dituangkan dalam anggaran organisasi.

b. Tujuan Pengukuran Kinerja

Menurut Mardiasmo (2009: 122), menyatakan secara umum tujuan pengukuran kinerja adalah:

- 1) Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (*top down dan bottom up*).
- 2) Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi.

- 3) Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai *goal congruence*.
- 4) Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

c. Manfaat Pengukuran Kinerja

Menurut Mardiasmo (2009: 122), menyatakan bahwa manfaat pengukuran kinerja adalah:

- 1) Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
- 2) Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
- 3) Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
- 4) Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward & punishment*) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
- 5) sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
- 6) Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
- 7) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
- 8) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

Menurut Rifai (2004: 333), pengukuran kinerja tujuannya adalah merupakan proses pengukuran kinerja dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan untuk jangka waktu tertentu.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan dilakukan pengukuran kinerja adalah untuk melihat kualitas SDM atau karyawan yang ada guna menunjang keberhasilan tujuan dari organisasi pemerintah.

d. Indikator Kinerja Dalam Pengukuran Kinerja

Indikator kinerja digunakan sebagai indikator pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tersebut dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan utama organisasi (*critical success factors*) dan indikator kinerja kunci (*key performance indicator*). Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif.

Indikator biaya biasanya diukur dalam bentuk biaya unit (*unit cost*), misalnya biaya per unit pelayanan (panjang jalan yang diperbaiki, jumlah ton sampah yang terangkut, biaya per siswa). Beberapa pelayanan mungkin tidak dapat ditentukan biaya unitnya, karena output yang dihasilkan tidak dapat dikuantifikasi atau tidak ada keseragaman tipe pelayanan yang diberikan. Untuk kondisi tersebut dapat dibuat indikator kinerja proksi misalnya belanja per kapita (misalnya: belanja per 1000 penduduk).

Salah satu contoh pengembangan indikator kinerja pada dinas pekerjaan umum memiliki indikator kinerja diantaranya panjang jalan

yang dibangun atau diperbaiki / total panjang jalan, panjang jalan yang disapu atau dibersihkan / total panjang jalan, kondisi jalan, dan keamanan jalan (*road safety*).

e. Prinsip-Prinsip Pemilihan Ukuran Kinerja

Menurut Indra (2006: 278), pemilihan ukuran kinerja untuk instansi pemerintah perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1) Evaluasi Kembali Ukuran yang Ada

Informasi kinerja tetap dibutuhkan oleh manajemen. Apabila skema indikator kinerja sudah tidak berfungsi, maka manajemen akan mengembangkan skema baru. Tidak berfungsinya skema dapat disebabkan ketidak cocokannya logika ilmu dengan interpretasi riilnya. Sehingga kesesuaian ilmu pengetahuan dengan indikator kinerja akan menghasilkan interpretasi penerapan skema indikator kinerja yang lebih tajam dan riil.

2) Mengukur Kegiatan yang Penting Tidak Hanya Hasil Secara Keseluruhan

Kinerja selalu berorientasikan hasil. Ukuran hasil sering di formulasikan dalam rasio keuangan. Pencapaian hasil akan menunjukkan adanya permasalahan. Hasil tersebut tidak dapat menunjukkan diagnosis hasil.

3) Pengukuran Harus Mendorong Tim Kerja yang Akan Mencapai Tujuan (*Goal-Driven Team Work*)

Pembagian proses pengukuran menciptakan lingkungan tim kerja yang aktivitasnya diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi, dan hal ini adalah baik. Suatu organisasi yang modern terlalu kompleks untuk ditangani secara menyeluruh oleh seseorang atau departemen. Agar hal ini dapat terealisasi, sebuah tim harus bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

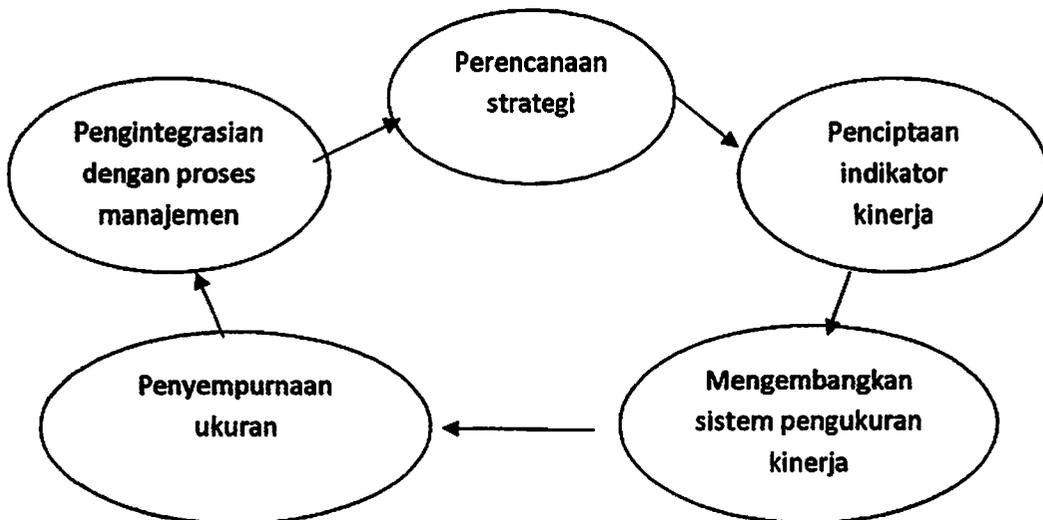
4) Pengukuran Harus Merupakan Perangkat yang Terintegrasi, Seimbang Dalam Penerapan

Agar efektif, sistem pengukuran harus diciptakan sebagai perangkat integrasi yang diperoleh dari strategi perusahaan. Sebagian besar perusahaan berusaha meminimalkan biaya, meningkatkan kualitas, mengurangi waktu pelaksanaan produksi, dan menciptakan pengembalian investasi yang wajar.

5) Pengukuran Harus Memiliki Fokus Eksternal Jika Memungkinkan

Ukuran internal yang umum dipakai disebagian besar organisasi adalah perbandingan kinerja dari tahun ke tahun. Suatu perbandingan tertentu dapat dilakukan ke tingkat mikro: divisi, departemen, kelompok, bahkan individu.

Gambar II.1
Gambar Siklus Pengukuran Kinerja



Sumber: Indra Bastian, (2006)

6) Siklus Pengukuran Kinerja

(a) Perencanaan Strategi

Siklus pengukuran kinerja dimulai dengan proses penskemaan strategik, yang berkenaan dengan penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran, kebijakan, program operasional dan kegiatan/aktivitas.

(b) Penciptaan Indikator Kinerja

Setelah perumusan strategik, instansi pemerintah perlu mulai menyusun dan menetapkan ukuran/indikator kinerja. Ada beberapa aktivitas dari beberapa jenis program yang dilaksanakan dalam proses ini untuk menghasilkan indikator kinerja yang mudah dan sederhana, dimana indikator kinerja berupa input, proses, output, outcome, benefit, atau impact.

Indikator atau ukuran yang mudah adalah untuk aktivitas yang dapat dihitung, misalnya jumlah klain yang diproses.

(c) Mengembangkan Sistem Pengukuran Kinerja

Ada tiga kegiatan dalam tahap ini: pertama, meyakinkan keberadaan data yang diperlukan dalam siklus pengukuran kinerja. Kedua, mengukur kinerja dengan data yang tersedia dan data yang dikumpulkan. Ketiga, penggunaan data pengukuran kinerja yang dihimpun, harus dipresentasikan dalam cara-cara yang dapat dimengerti dan bermanfaat.

(d) Penyempurnaan Ukuran

Pada tahapan ini, pemikiran kembali atas indikator hasil (*outcome*) dan indikator dampak (*impact*) menjadi lebih penting dibandingkan pemikiran kembali atas indikator masukan (*inputs*) dan keluaran (*outputs*).

(e) Pengintegrasian dengan Proses Manajemen

Bagaimana menggunakan ukuran kinerja tersedia secara efektif merupakan tantangan selanjutnya. Penggunaan data organisasi dapat dijadikan alat untuk memotivasi tindakan dalam organisasi.

3. Pengukuran Kinerja dengan *Metode Value For Money*

a. Pengertian *Value For Money*

Menurut Mardiasmo (2009 :4), *value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Selain itu juga *value*

for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah.

b. Tujuan *Value For Money*

Menurut Indra (2006: 270), tujuan konsep *value for money* adalah untuk menguraikan masalah melalui langkah permodelan yang sangat krusial, dimana analisis kinerja diterapkan melalui proses penilaian kinerja sektor publik.

c. Langkah-Langkah Pengukuran *Value For Money*

Menurut Mardiasmo (2009: 133), pengukuran *value for money* harus memperhatikan beberapa hal yaitu:

1) Pengukuran Tingkat Ekonomis

Ekonomis sering diartikan sebuah kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati-hati dan cermat (*prudence*) dan tidak ada pemborosan. Suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis bila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Mengukur tingkat kehematan dari pengetahuan-pengetahuan yang dilakukan organisasi sektor publik. Pengukuran tingkat ekonomis memerlukan data-data anggaran, pengeluaran, dan realisasinya.

Mardiasmo (2002: 133) pengukuran efektivitas hanya memperhatikan keluaran yang didapat, sedangkan pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Ekonomi merupakan ukuran relatif. Ekonomi diukur dengan rasio antara nilai input dengan input yang masuk.

$$\text{Tingkat Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi belanja}}{\text{Anggaran belanja}} \times 100\%$$

Kriteria ekonomis:

- (a) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($X < 100\%$), berarti ekonomis.
- (b) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($X = 100\%$), berarti ekonomis berimbang.
- (c) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($X > 100\%$), berarti tidak ekonomis.

2) Pengukuran Tingkat Efisiensi

Efisiensi merupakan hal penting dari ketiga pokok bahasan *value for money*. Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi organisasi. Proses kegiatan operasional ini dapat dikatakan efisien apabila produk yang dihasilkan atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan biaya yang serendah-rendahnya (*spending well*). Jadi pada dasarnya pengertian yang serupa antara efisien dan ekonomis karena keduanya menghendaki penghapusan dan penurunan biaya (*cost reduction*). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dan keluaran yang dihasilkan.

Mardiasmo (2002: 133) Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibandingkan input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi organisasi.

Tingkat Efisiensi =

$$\frac{\text{Realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan}}{\text{Anggaran pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria efisiensi:

- (a) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($X < 100\%$), berarti efisien.
- (b) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($X = 100\%$), berarti efisien seimbang.
- (c) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($X > 100\%$), berarti tidak efisien.

Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dan keluaran yang dihasilkan.

3) Pengukuran Tingkat Efektivitas

Efektivitas berhubungan dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Mardiasmo (2002:133) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

$$\text{Tingkat Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pendapatan}}{\text{Anggaran pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria efektivitas:

- (a) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($X < 100\%$), berarti efektif.
- (b) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($X = 100\%$), berarti efektivitas berimbang.
- (c) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($X > 100\%$), berarti tidak efektif.

Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak dari keluaran program dalam mencapai tujuan.

4) Pengukuran *Outcome*

Outcome merupakan dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. *Outcome* lebih tinggi nilainya dari pada *output*, karena *output* hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya. Pengukuran *outcome* memiliki dua peran, yaitu peran *retrospektif* dan *prospektif*. Peran *retrospektif* berhubungan dengan penilaian kinerja masa lalu, sedangkan *prospektif* terkait dengan perencanaan kinerja dimasa yang akan datang.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2013: 35) jenis penelitian berdasarkan tingkat eksplanasi dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variable mandiri, baik hanya pada suatu variable atau lebih (variable yang berdiri sendiri). Penelitian ini disebut juga sebagai penelitian pengembangan karena meluas pada sejumlah variasi, situasi dan kondisi. Oleh karena itu tidak mendalam melainkan hanya beberapa saja yang merupakan masalah.

2. Penelitian Komparatif

Penelitian komperatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variable atau lebih sampel yang berbeda, atau waktu yang berbeda.

3. Penelitian Asosiatif

Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan dua variable atau lebih.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bersifat menjelaskan pengukuran kinerja dengan penerapan metode *Value For Money* pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Empat Lawang.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera KM.3,5 Komp.Perkantoran Pemkab Empat Lawang Kecamatan Tebing Tinggi Sumatera Selatan.

C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Pengukuran kinerja dengan penerapan metode <i>value for money</i> .	Bagian atau proses pengendalian manajemen publik untuk mengukur pencapaian suatu kegiatan atau program secara periodik guna mengetahui pencapaian tujuan yang telah ditetapkan yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif.	Metode <i>Value For Money</i> : a. Ekonomis b. Efisiensi c. Efektivitas d. Outcome

Sumber: penulis, (2014)

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan gejala/satuan yang ingin diteliti (Bambang Prasetyo & Lina Miftahul Jannah, 2010:119). Populasi penelitian ini adalah masyarakat/penduduk Kabupaten Empat Lawang.

2. Sampel

Karena banyaknya jumlah populasi yang ingin diteliti, maka digunakan sampling. Sampling atau sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin

diteliti. Oleh karena itu, sampel harus dilihat sebagai suatu pendugaan terhadap populasi dan bukan populasi itu sendiri (Bailey 1994:83, dalam Bambang Prasetyo & Lina Miftahul Jannah, 2010:119).

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini akan menggunakan metode penarikan purposive yaitu pengambilan sampel yang digunakan dengan menggunakan kriteria khusus terhadap sampel (Bambang Prasetyo & Lina Miftahul Jannah, 2010:135).

Adapun responden untuk pengukuran outcome dalam penelitian ini adalah masyarakat kota Makassar yang dianggap melihat atau merasakan secara langsung kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pemerintah.

Karena keterbatasan waktu dan biaya, serta banyaknya jumlah populasi penduduk Kota Makassar, maka dalam menentukan jumlah sampel yang akan digunakan peneliti menggunakan pedoman kasar (rules of thumb) yang dikemukakan oleh Roscoe dalam Dewi Sartika (2006), yaitu:

1. Jumlah sampel yang tepat untuk penelitian adalah $30 < n < 500$.
2. Jika sampel terbagi dalam beberapa subsampel, maka jumlah sampel minimum untuk tiap subsampel adalah 30.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menetapkan jumlah kuesioner yang disebarakan untuk meneliti outcome minimal sebanyak 50 eksamplar.

E. Data yang Diperlukan

Menurut Nur dan Bambang (2009: 146) data dilihat dari sumbernya terdiri dari:

1. Data Primer

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh melalui hasil perolehan pihak kedua dari hasil penelitian laporan baik berupa data kualitatif maupun kuantitatif.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa gambaran umum dan data laporan anggaran dan realisasi belanja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang. Sedangkan data sekunder di dapat dari masyarakat.

F. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan cara pengumpulannya, menurut Nan Lin ahli W.gulo (2002: 115) teknik pengumpulan data dibagi menjadi:

1. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.

2. Survey

Survey adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan instrument untuk meminta tanggapan dari responden tentang sampel.

3. Wawancara

Wawancara yaitu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi langsung dalam bentuk Tanya jawab dalam

hubungan tatap muka, sehingga gerak mimic responden merupakan media yang melengkapi kata-kata secara variable.

4. Kuesioner (Angket)

Kuesioner dan angket hanya berbeda dalam bentuknya. Pada kuesioner pertanyaan disusun dalam bentuk kalimat Tanya, sedangkan pada angket pertanyaan disusun dalam kalimat pertanyaan dengan opsi jawaban yang tersedia.

5. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu.

Metode pengumpulan data yang digunakan di penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, dan kuesioner (angket). Wawancara dengan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pimpinan atau karyawan-karyawannya. Dokumentasi dengan cara meminta secara langsung data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Serta kuesioner dengan cara membagikan angket kepada masyarakat sekitar Kabupaten Empat Lawang.

G. Analisis Data dan Teknik Analisis

1. Analisis Data

Menurut Sugiyono (2009: 13) analisis data dalam penelitian dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

a. Metode kualitatif

Data kualitatif adalah suatu metode analisis data dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar.

b. Metode Kuantitatif

Data kuantitatif adalah suatu metode analisis dengan menggunakan data yang berbentuk angka, atau kualitatif yang diangkakan.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Teknik analisis kualitatif yang digunakan adalah uraian penjelasan yang berkaitan dengan kinerja anggaran dan realisasi dengan menggunakan metode *Value For Money* dengan indikator ekonomis, efisiensi, efektivitas, dan outcome.

Teknik analisis kuantitatif dilakukan dengan cara menyajikan angka, tabel, dan uraian penjelasan mengenai anggaran dan realisasi dengan menggunakan metode *Value For Money* pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang.

2. Teknik Analisis

Teknik analisis kuantitatif dilakukan dengan cara menyajikan angka, tabel, dan uraian penjelasan mengenai anggaran dan realisasi belanja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang.

Teknik analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan rumus *Value For Money*, yaitu:

$$a. \text{ Tingkat Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi belanja}}{\text{Anggaran belanja}} \times 100\%$$

$$b. \text{ Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan}}{\text{Anggaran pendapatan}} \times 100\%$$

$$c. \text{ Tingkat Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi pendapatan}}{\text{Anggaran pendapatan}} \times 100\%$$

- d. Mengukur *outcome* atau dampak kegiatan yang telah dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang terhadap masyarakat yaitu dengan menyebarkan angket mengenai jalan dan jembatan yang telah di buat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 17 Tahun 2011 tertanggal 26 Juli 2011 yang menyatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) Kabupaten Empat Lawang melaksanakan kewenangan disentralisasi dan tugas dekosentralisasi dibidang pekerjaan umum.

Dalam Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud Peraturan Bupati Kabupaten Empat Lawang Nomor 13 tahun 2007 Tanggal 16 Agustus 2007 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Empat Lawang mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Kegiatan Administrasi umum, Perencanaan program, Kepagawaian dan Keuangan.
- b. Pemberian perizinan dan Pelayanan Teknis Pembangunan di Bidang Jalan, dan Jembatan.
- c. Penyelenggaraan Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian Teknis di Bidang Jalan dan Jembatan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati.
- d. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis Dinas dalam lingkungan tugas.

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang menetapkan tujuan strategi berdasarkan sasaran jangka menengah yaitu :

- a. Meningkatkan pembangunan jalan
- 1) Pembukaan jalan baru
 - 2) Peningkatan jalan
 - 3) Pengerasan jalan
 - 4) Pengaspalan jalan dengan HOTMIX
- b. Meningkatkan pembangunan jembatan
- 1) Pembuatan jembatan gantung
 - 2) Rehab jembatan gantung
 - 3) Rehab jembatan beton
 - 4) Pembuatan jembatan beton

2. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang

a. Visi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang

Visi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPU BM) Kabupaten Empat Lawang adalah yang mana mengacu dalam perwujudan Visi dan Misi Kabupaten Empat Lawang 2013-2015 “Terwujudnya Kabupaten Empat Lawang Menjadi Kabupaten Ekonomi Maju, Aman, Sehat dan

Sejahtera (EMASS) Periode ke II“ yaitu Mewujudkan Layanan Akses Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Berkelanjutan.

b. Misi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang

Misi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPU BM) Kabupaten Empat Lawang ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Aksesibilitas, Mobilitas, kondisi dan keselamatan pengguna Jalan dan Jembatan.
- 2) Meningkatkan Kualitas pelayanan administrasi.

3. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas

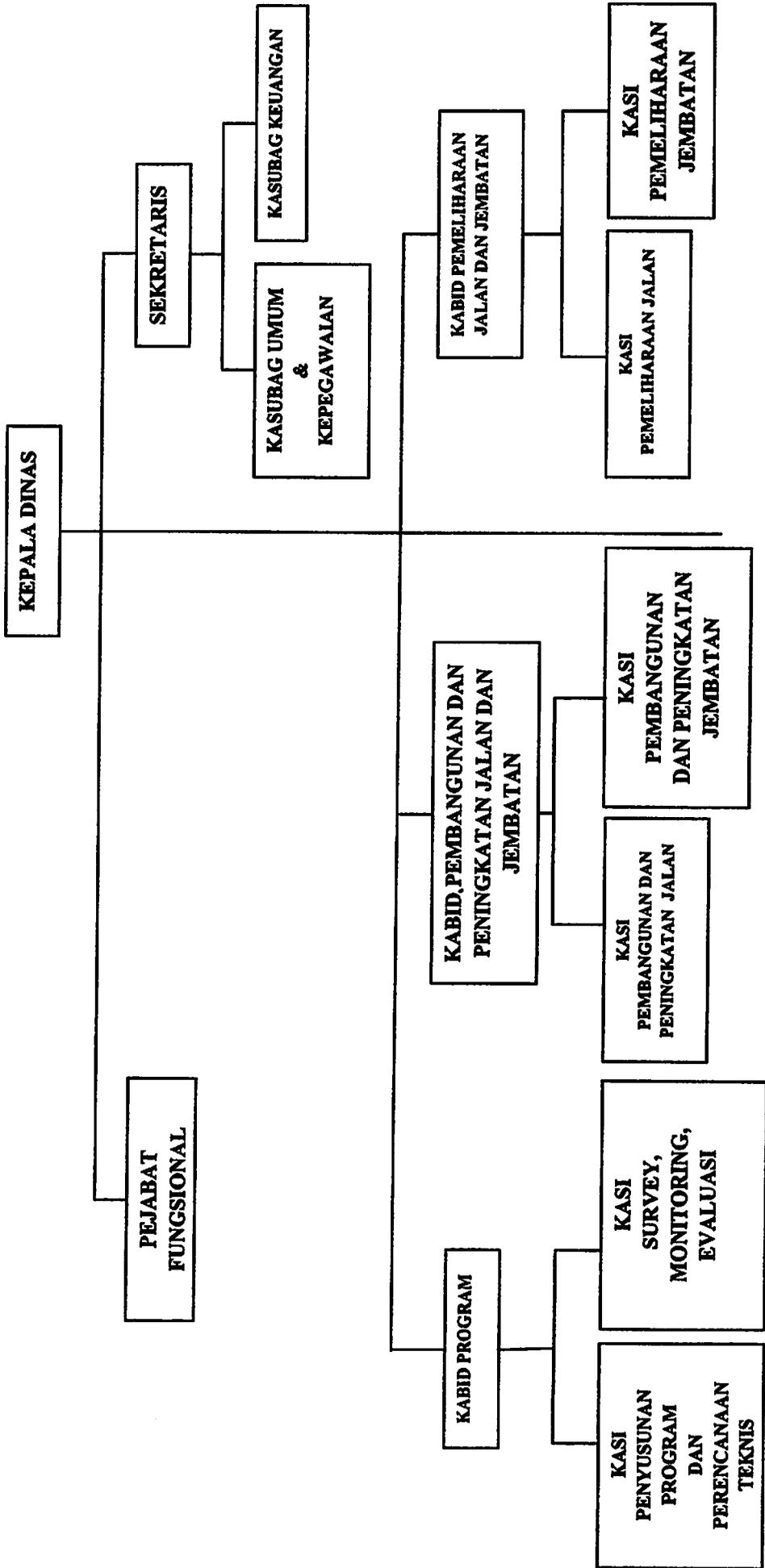
a. Struktur Organisasi

Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang adalah Dinas yang menjadi ujung tombak yang bertugas dalam pembangunan infrastruktur pelayanan publik, meningkatkan roda perekonomian masyarakat dalam mewujudkan akses pembukaan ruang infrastruktur lainnya yang bersama dengan Dinas lainnya. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga memiliki sejumlah bidang yang dikepalai oleh Kepala Bidang, sedangkan yang memimpin Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang sendiri adalah Kepala Dinas.

Berikut adalah struktur organisasi dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Seketariat
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Keuangan
- 3) Bidang Bina Program
 - a) Seksi penyusunan program dan perencanaan teknis
 - b) Seksi survey, monitoring dan evaluasi
- 4) Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
 - a) Seksi pembangunan dan peningkatan jalan
 - b) Seksi pembangunan dan peningkatan jembatan
- 5) Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - a) Seksi pemeliharaan jalan
 - b) Seksi pemeliharaan jembatan
- 6) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang



UPTD

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang, 2014

b. Pembagian Tugas

1) Kepala Dinas

a) Tugas

Mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahan supaya tugas-tugas Dinas terlaksana dengan baik.

- (1) Merumuskan konsep sasaran suatu peraturan perundang-undangan beserta petunjuk kerja lainnya untuk pelaksanaan tugas Dinas.
- (2) Mengkoordinasikan tugas-tugas kesekretariatan, Bidang-Bidang maupun Subag-Subag dan Seksi-Seksi yang berada dibawahnya dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
- (3) Mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, mengintegrasikan tugas dan kegiatan pada unit kerja lainnya baik otonom maupun vertical.
- (4) Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan bidang keteknisian Bina Marga pembinaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan dilingkungan Dinas.
- (5) Merumuskan konsep sasaran tentang perencanaan, pengolahan dan penelaahan atas perumusan kebijakan Bupati Kepala Daerah.
- (6) Menyelenggarakan Operasional Dinas dalam rangka terlaksananya proses kegiatan kerja yang telah diprogramkan.

- (7) Membina bawahan supaya tugas-tugas Dinas dapat terbagi habis dan terlaksana dengan baik.
- (8) Mengevaluasi tugas bawahan, selanjutnya memberikan nilai kepada bawahan setiap akhir tahun yang dicantumkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan(DP3).
- (9) Melaporkan kegiatan Dinas baik secara bulanan, triwulan, tahunan maupun secara insidental.
- (10)Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis dibidang Pekerjaan Umum kepada Bupati.
- (11)Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2) Seketariat

a) Tugas

- (1) Merencanakan operasional kegiatan kesekretariatan baik secara bulanan, tahunan maupun insidental.
- (2) Membagi tugas Kepada Sub Bagian - Sub Bagian supaya tugas - tugas Sekretariat terbagi habis terlaksana dengan baik.
- (3) Memberikan petunjuk Kepada Sub Bagian - Sub Bagian untuk kelancaran pelaksanaan tugas - tugas kesekretariatan.
- (4) Menghimpun peraturan perundang-undangan beserta petunjuk kerja lainnya pedoman pelaksanaan tugas kesekretariatan.
- (5) Memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam pelaksanaan tugas-tugas Dinas sehari-hari.

- (6) Mengatur jadwal pelaksanaan rapat dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga baik secara bulanan, triwulan, semester maupun tahunan yang dituangkan dalam notulen rapat.
 - (7) Mengevaluasi tugas bawahan selanjutnya memberikan nilai kepada bawahan setiap akhir tahun yang dicantumkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3).
 - (8) Melaporkan kegiatan kesekretariatan baik yang telah maupun belum dilaksanakan guna selanjutnya memberikan saran atau usul kepada atasan untuk kelancaran tugas.
 - (9) Melaporkan bahan laporan dari masing-masing Bidang yang selanjutnya menyusun laporan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga baik secara bulanan, triwulan maupun tahunan.
 - (10) Memberikan petunjuk dan pembinaan organisasi tata laksana, pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan administrasi surat-menyurat, administrasi kepegawaian, keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga.
 - (11) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- b) Bagian Seketariat terdiri dari:
- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan, mempunyai tugas :

- (a) Membuat laporan hasil pekerjaan sub bagian umum dan kepegawaian guna selanjutnya memberikan saran atau usul kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (b) Membagi tugas kepada bawahan supaya tugas-tugas sub bagian umum dan kepegawaian terbagi habis dan terlaksana dengan baik.
- (c) Merencanakan kegiatan bidang sub bagian umum dan kepegawaian baik secara bulanan, tahunan maupun insidental.
- (d) Menghimpun dan menyusun peraturan perundang-undangan beserta petunjuk pelaksanaan (Juklak) untuk pedoman melaksanakan tugas sub bagian umum dan kepegawaian.
- (e) Melaksanakan koordinasi kepada sub bagian lainnya pada sekretariat untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (f) Memberikan nilai kepada bawahan setiap kahir tahun yang dicantumkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3).
- (g) Memberikan petunjuk pembuatan naskah dinas dan surat-surat biasa yang berhubungan dengan sub bagian umum dan kepegawaian.

- (h) Memeriksa dan meneliti konsep naskah dinas dan surat-surat biasa dari bawahan yang selanjutnya siap untuk diketik dan ditambahkan paraf pada hasil ketikan.
 - (i) Membuat laporan baik secara bulanan maupun insidental melalui sekretaris.
 - (j) Melaksanakan tugas surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengadaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, dan perlengkapan kantor, inventarisasi serta memeriksa, menyiapkan bahan pembuatan, penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai.
 - (k) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, mempunyai tugas :
- (a) Membuat rencana anggaran keuangan rutin dan pembangunan dinas PU bina marga kabupaten empat lawang.
 - (b) Membuat laporan hasil pekerjaan sub bagian keuangan guna selanjutnya memberikan saran atau usul kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
 - (c) Membagi tugas kepada bawahan supaya tugas-tugas sub bagian keuangan terbagi habis dan terlaksana dengan baik.

- (d) Merencanakan kegiatan bidang sub bagian keuangan baik secara bulanan, tahunan maupun insidental.
- (e) Menghimpun dan menyusun peraturan perundang-undangan beserta petunjuk pelaksanaan (juklak) untuk pedoman melaksanakan tugas sub bagian keuangan.
- (f) Melaksanakan koordinasi kepada sub bagian lainnya pada sekretariat untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (g) Memberikan nilai kepada bawahan setiap akhir tahun yang dicantumkan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3).
- (h) Memberikan petunjuk pembuatan konsep naskah dinas dan surat-surat biasa yang berhubungan dengan tugas sub bagian keuangan.
- (i) Memeriksa dan meneliti konsep naskah dinas dan surat-surat biasa dari bawahan yang selanjutnya siap untuk diketik dan membubuhkan paraf pada hasil ketikan.
- (j) Membuat laporan baik secara bulanan maupun insidental melalui sekretariat.
- (k) Memeriksa dan menyiapkan bahan penyusunan anggaran dan belanja dinas, mengurus pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi serta perbendaharaan.
- (l) Melaksanakan tugas-tugas kcdinasan yang diberikan oleh atasan.

3) Bidang Bina Program Dinas

a) Tugas

- (1) Merencanakan operasional kegiatan bidang perencanaan dan program baik secara bulanan, tahunan maupun insidental.
- (2) Membagi tugas kepada kasi-kasi supaya tugas-tugas bidang perencanaan dan program terbagi habis dan terlaksana dengan baik.
- (3) Memberikan petunjuk kepada kasi-kasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas bidang bina marga dan program.
- (4) Menghimpun peraturan perundang-undangan beserta petunjuk kerja lainnya untuk pedoman pelaksanaan tugas bidang bina marga dan program.
- (5) Memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam pelaksanaan tugas-tugas dinas sehari-hari.
- (6) Mengevaluasi tugas bawahan selanjutnya memberikan nilai kepada bawahan setiap akhir tahun yang dicantumkan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP.3).
- (7) Melaporkan kegiatan bidang bina marga dan program baik yang telah maupun yang belum dilaksanakan guna selanjutnya memberikan saran/usul kepada atasan untuk kelancaran tugas.
- (8) Menghimpun bahan laporan dari seksi-seksi bawahannya, yang selanjutnya menyusun laporan kepada kepala dinas baik secara bulanan, triwulan maupun tahunan melalui sekretariat.

(9) Melaksanakan penyusunan perencanaan program jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dibidang pekerjaan umum serta melaksanakan pengendalian/pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dibidang bina marga.

(10) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

b) Sub Bidang Bina Program terdiri dari

(1) Kepala Seksi Penyusunan Program dan Perencanaan Teknis, mempunyai tugas:

(a) Membuat Laporan hasil pekerjaan penyusunan program dan perencanaan teknis bina marga dan memberikan saran dan usul kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

(b) Membagi tugas kepada bawahan supaya tugas-tugas terbagi habis dan terlaksana dengan baik.

(c) Merencanakan kegiatan bidang seksi penyusunan program dan perencanaan baik secara bulanan, tahunan maupun insidental.

(d) Menghimpun dan menyusun peraturan perundang-undangan beserta petunjuk pelaksanaan (juklak) untuk pedoman melaksanakan tugas perencanaan kebinamargaan.

(e) Melaksanakan koordinasi kepada seksi lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

- (f) Memberikan nilai kepada bawahan setiap akhir tahun yang dicantumkan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP.3).
 - (g) Memberikan petunjuk pembuatan konsep naskah dinas dan surat-surat biasa yang berhubungan dengan tugas seksi perencanaan bina marga dan kepada bawahan.
 - (h) Memeriksa dan meneliti konsep naskah dan surat-surat biasa dan bawahan yang selanjutnya siap untuk diketik dan membubuhkan paraf pada hasil ketikan.
 - (i) Membuat laporan secara bulanan maupun insidental melalui kepalabidang perencanaan dan program.
 - (j) Melaksanakan, pengumpulan data, penelitian, penyelidikan, study kelayakan dalam rangka pembangunan dan pengembangan dibidang kebinamargaan.
 - (k) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (2) Kepala Seksi Survey, Monitoring dan Evaluasi, mempunyai tugas :
- (a) Membuat laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan guna selanjutnya memberikan saran/usul kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

- (b) Membagi tugas kepada bawahan supaya tugas-tugas seksi survey monitoring, terbagi habis dan terlaksana dengan baik.
- (c) Merencanakan kegiatan bidang seksi survey monitoring, evaluasi dan pelaporan baik secara bulanan, tahunan maupun insidental.
- (d) Menghimpun dan menyusun peraturan perundang-undangan beserta petunjuk pelaksanaan (Juklak) untuk pedoman pelaksanaan tugas.
- (e) Mengadakan koordinasi kepada Seksi lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (f) Memberikan nilai kepada bawahan setiap akhir tahun yang dicantumkan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP.3).
- (g) Memberikan petunjuk pembuatan konsep naskah dinas dan surat-surat biasa kepada bawahan yang berhubungan dengan tugas seksi survey monitoring.
- (h) Memeriksa dan meneliti konsep naskah dinas dan surat-surat biasa dari bawahan yang selanjutnya siap untuk diketik dan membubuhkan paraf pada hasil ketikan.
- (i) Melaksanakan survey monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan fisik dan keuangan, menyusun laporan

prestasi pekerjaan dan manfaat serta dampak kegiatan perkembangan di bidang kebina margaan.

- (j) Membuat laporan secara bulanan maupun insidentil melalui kepala bidang perencanaan dan program.
- (k) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

4) Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan

a) Tugas

- (1) Merencanakan operasional kegiatan bidang pembanguna dan peningkatan jalan dan jembatan baik secara bulanan, tahunan maupun insidentil.
- (2) Membagi tugas kepada kasi-kasi supaya tugas-tugas bidang terbagi habis dan terlaksana dengan baik.
- (3) Memberikan petunjuk kepada kasi-kasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas bidang pembanguna dan peningkatan jalan dan jembatan.
- (4) Menghimpun dan menyusun peraturan perundang-undangan beserta petunjuk kerja lainnya untuk pedoman melaksanakan tugas bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (5) Memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam pelaksanaan tugas-tugas bidang pembangunan dan pemeliharaan dan pemelihara jalan dan jembatan.

- (6) Mengevaluasi tugas bawahan selanjutnya memberikan nilai kepada bawahan setiap akhir tahun yang dicantumkan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP.3).
 - (7) Melaporkan kegiatan bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan baik yang telah maupun yang belum dilaksanakan guna selanjutnya memberikan saran/usul kepada atasan untuk kelancaran tugas.
 - (8) Melaporkan kegiatan bidang bina barga baik yang telah maupun yang belum dilaksanakan guna selanjutnya memberikan saran/usul kepada atasan untuk kelancaran tugas.
 - (9) Menghimpun bahan laporan dari seksi-seksi bawahannya, yang selanjutnya menyusun laporan kepada kepala dinas baik secara bulanan, triwulan maupun tahunan melalui kepala sekretariat.
 - (10) Melaksanakan penyusunan rencana, mekanisme pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan, melaksanakan pemeliharaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan jalan Kabupaten/Kota.
 - (11) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- b) Sub Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
- (1) Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan mempunyai tugas:

- (a) Membuat laporan hasil pekerjaan seksi pembangunan dan peningkatan jalan guna selanjutnya memberikan saran/usul kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (b) Membagi tugas kepada bawahan supaya tugas-tugas seksi pembangunan dan peningkatan jalan terbagi habis dan terlaksana dengan baik.
- (c) Merencanakan kegiatan bidang seksi pembangunan dan peningkatan jalan baik secara bulanan, tahunan maupun insidental.
- (d) Menghimpun dan menyusun peraturan perundang-undangan beserta petunjuk pelaksanaan (juklak) untuk pedoman melaksanakan tugas seksi pembangunan dan peningkatan jalan.
- (e) Melaksanakan koordinasi kepada seksi lainnya pada bidang pembangunan dan pemelihara jalan dan jembatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (f) Memberikan nilai kepada bawahan setiap kepada bawahan setiap akhir tahun yang dicantumkan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP.3).
- (g) Memberikan petunjuk pembuatan konsep naskah dinas dan surat-surat biasa yang berhubungan dengan tugas seksi pembangunan dan peningkatan jalan.

- (h) Memeriksa dan meneliti konsep naskah dinas dan surat-surat biasa dari bawahan yang selanjutnya siap untuk diketik dan membubuhkan paraf pada hasil ketikan.
 - (i) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pembangunan peningkatan jalan serta merencanakan tata cara pelaksanaan pembangunan jalan serta menetapkan jenis konstruksi.
 - (j) Membuat laporan secara bulanan maupun insidentil melalui kepala bidang bina marga.
 - (k) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (2) Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan mempunyai tugas :
- (a) Membuat laporan hasil pekerjaan seksi pembangunan dan peningkatan jembatan guna selanjutnya memberikan saran /usul kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
 - (b) Membagi tugas kepada bawahan supaya tugas-tugas seksi pembangunan dan peningkatan jembatan terbagi habis dan terlaksana dengan baik.
 - (c) Merencanakan kegiatan bidang seksi pembangunan dan peningkatan jembatan baik secara bulanan, tahunan maupun insidentil.

- (d) Menghimpun dan menyusun peraturan perundang-undangan beserta petunjuk pelaksanaan (juklak) untuk pedoman melaksanakan tugas seksi pembangunan dan peningkatan jembatan.
- (e) Melaksanakan koordinasi kepada seksi lainnya pada bidang pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (f) Memberikan nilai kepada bawahan setiap kepada bawahan setiap akhir tahun yang dicantumkan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP.3).
- (g) Memberikan petunjuk pembuatan konsep naskah dinas dan surat-surat biasa yang berhubungan dengan tugas seksi pembangunan dan peningkatan jembatan.
- (h) Memeriksa dan meneliti konsep naskah dinas dan surat-surat biasa dari bawahan yang selanjutnya siap untuk diketik dan membubuhkan paraf pada hasil ketikan.
- (i) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jembatan.
- (j) Membuat laporan secara bulanan maupun insidental melalui kepala bidang bina marga.
- (k) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

5) Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

a) Tugas

- (1) Merencanakan operasional kegiatan Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan baik secara bulanan, tahunan maupun insidental;
- (2) Membagi tugas kepada kasi-kasi supaya tugas-tugas bidang terbagi habis dan terlaksana dengan baik.
- (3) Memberikan petunjuk kepada kasi-kasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas bidang pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (4) Menghimpun dan menyusun peraturan perundang-undangan beserta petunjuk kerja lainnya untuk pedoman melaksanakan tugas bidang pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (5) Memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam pelaksanaan tugas-tugas bidang pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (6) Mengevaluasi tugas bawahan selanjutnya memberikan nilai kepada bawahan setiap akhir tahun yang dicantumkan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP.3).
- (7) Melaporkan kegiatan bidang pemeliharaan jalan dan jembatan baik yang telah maupun yang belum dilaksanakan guna selanjutnya memberikan saran/usul kepada atasan untuk kelancaran tugas.

- (8) Melaporkan kegiatan bidang pemeliharaan jalan dan jembatan baik yang telah maupun yang belum dilaksanakan guna selanjutnya memberikan saran/usul kepada atasan untuk kelancaran tugas.
 - (9) Menghimpun bahan laporan dari seksi-seksi bawahannya, yang selanjutnya menyusun laporan kepada kepala dinas baik secara bulanan, triwulan maupun tahunan melalui kepala sekretariat.
 - (10) Melaksanakan penyusunan rencana, mekanisme pelaksanaan, melaksanakan pemeliharaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan jalan Kabupaten/Kota.
 - (11) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- b) Sub Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan terdiri dari:
- (1) Seksi Pemeliharaan Jalan memiliki tugas:
 - (a) Membuat laporan hasil pekerjaan seksi pemeliharaan jalan guna selanjutnya memberikan saran/usul kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
 - (b) Membagi tugas kepada bawahan supaya tugas-tugas seksi pemeliharaan jalan terbagi habis dan terlaksana dengan baik.
 - (c) Merencanakan kegiatan bidang seksi pemeliharaan jalan baik secara bulanan, tahunan maupun insidental.

- (d) Menghimpun dan menyusun peraturan perundang-undangan beserta petunjuk pelaksanaan (juklak) untuk pedoman melaksanakan tugas seksi pemeliharaan jalan.
- (e) Melaksanakan koordinasi kepada seksi lainnya pada bidang bina marga untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (f) Memberikan nilai kepada bawahan setiap kepada bawahan setiap akhir tahun yang dicantumkan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP.3).
- (g) Memberikan petunjuk pembuatan konsep naskah dinas dan surat-surat biasa yang berhubungan dengan tugas seksi pemeliharaan jalan.
- (h) Memeriksa dan meneliti konsep naskah dinas dan surat-surat biasa dari bawahan yang selanjutnya siap untuk diketik dan membubuhkan paraf pada hasil ketikan;
- (i) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan, pengelolaan perizinan, penggunaan DMJ, menetapkan batas-batas daerah jalan, memberikan bimbingan, arahan dan sosialisasi, serta pengawasan pemanfaatan jalan dan penanggulangan akibat bencana alam.
- (j) Membuat laporan secara bulanan maupun insidental melalui kepala bidang bina marga.

(k) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

(1) Kepala Seksi Pemeliharaan Jembatan memiliki tugas:

- (a) Membuat laporan hasil pekerjaan seksi pemeliharaan jembatan guna selanjutnya memberikan saran/usul kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (b) Membagi tugas kepada bawahan supaya tugas-tugas seksi pemeliharaan jembatan terbagi habis dan terlaksana dengan baik.
- (c) Merencanakan kegiatan bidang seksi pemeliharaan jembatan baik secara bulanan, tahunan maupun insidental.
- (d) Menghimpun dan menyusun peraturan perundang-undangan beserta petunjuk pelaksanaan (juklak) untuk pedoman melaksanakan tugas seksi pemeliharaan jembatan.
- (e) Melaksanakan koordinasi kepada seksi lainnya pada bidang bina marga untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (f) Memberikan nilai kepada bawahan setiap kepada bawahan setiap akhir tahun yang dicantumkan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP.3).
- (g) Memberikan petunjuk pembuatan konsep naskah dinas dan surat-surat biasa yang berhubungan dengan tugas seksi pemeliharaan jembatan.

- (h) Memeriksa dan meneliti konsep naskah dinas dan surat-surat biasa dari bawahan yang selanjutnya siap untuk diketik dan membubuhkan paraf pada hasil ketikan.
- (i) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan melaksanakan kegiatan pemeliharaan jembatan, pengelolaan perizinan, penggunaan DMJ, menetapkan batas-batas daerah jembatan, memberikan bimbingan, arahan dan sosialisasi, serta pengawasan pemanfaatan jalan dan penanggulangan akibat bencana alam.
- (j) Membuat laporan secara bulanan maupun insidental melalui kepala bidang bina marga.
- (k) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

6) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

a) Tugas

- (1) Unit pelaksana teknik dinas merupakan unsur pelaksana teknik operasional dinas.
- (2) Unit pelaksana teknik dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas, di satu atau beberapa wilayah kecamatan dalam satu daerah.

b) Fungsi

(1) Melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidangnya.

(2) Pelaksanaan urusan administrasi.

c) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari:

(1) Kepala.

(2) Unsur staf/petugas administrasi.

(3) Unsur lain/petugas Teknik Operasional.

(4) Kelompok jabatan fungsional.

Tabel IV.1
Realisasi Anggaran APBD pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Kabupaten Empat Lawang
Tahun 2011-2013

Tahun	Anggaran	Realisasi	Capaian %
2011	57.931.252.373	39.408.954.189	68,02 %
2012	140.273.428.800	110.298.170.212	78,63 %
2013	198.229.339.753	137.737.789.890	69,48 %

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang, 2014.

Tabel IV.2
Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Kabupaten Empat Lawang
Tahun 2011-2013

Uraian	Anggaran	Realisasi
Tahun 2011		
Belanja Langsung	57.886.597.845	39.365.038.356
Belanja Tidak Langsung	44.654.528	43.915.833
Total Belanja	57.931.252.373	39.408.954.189
Tahun 2012		
Belanja Langsung	138.962.526.400	108.549.038.230
Belanja Tidak Langsung	1.310.902.400	1.749.131.982
Total Belanja	140.273.428.800	110.298.170.212
Tahun 2013		
Belanja Langsung	197.090.486.655	136.227.550.236
Belanja Tidak Langsung	1.138.853.098	1.510.239.654
Total Belanja	198.229.339.753	137.737.789.890

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang, 2014.

B. Pembahasan

Pembahasan pada bab ini dimaksudkan untuk menganalisa kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang dengan menggunakan konsep *value for money*.

1. Tingkat Ekonomi

Ekonomi berkaitan dengan pengukuran seberapa hemat pengeluaran yang dilakukan dan juga mencakup pengelolaan secara hati-hati dan cermat dan tidak ada pemborosan. Suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis jika dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu.

Dalam pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang tolak ukur yang digunakan adalah anggaran dan realisasi belanja atau sesuai dengan indikator ekonomis yaitu

membandingkan realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran dikalikan 100%.

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi pengeluaran}}{\text{Anggaran pengeluaran}} \times 100\%$$

Dengan rumus di atas dapat dilakukan analisa tingkat ekonomis anggaran dan realisasi belanja yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang setiap tahunnya sebagai berikut:

a. Tahun 2011

1) Belanja Tidak Langsung

$$\begin{aligned} \text{Tingkat ekonomis} &= \frac{43.915.833}{44.654.528} \times 100\% \\ &= 98,34 \% \end{aligned}$$

Artinya pada tahun 2011 tingkat realisasi belanja tidak langsung untuk kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang adalah 98,34 %. Berdasarkan kriteria di atas jika diperoleh nilai kurang dari 100% dari tingkat ekonomi berarti pengukuran kinerja tahun 2011 adalah ekonomis.

2) Belanja Langsung

$$\begin{aligned} \text{Tingkat ekonomis} &= \frac{39.365.038.356}{57.886.597.845} \times 100\% \\ &= 68 \% \end{aligned}$$

Artinya pada tahun 2011 tingkat realisasi belanja langsung untuk kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang adalah 68 %. Berdasarkan kriteria

di atas jika diperoleh nilai kurang dari 100% dari tingkat ekonomi berarti pengukuran kinerja tahun 2011 adalah ekonomis.

b. Tahun 2012

1) Belanja Tidak Langsung

$$\begin{aligned} \text{Tingkat ekonomis} &= \frac{1.749.131.982}{1.10.902.400} \times 100\% \\ &= 133,42\% \end{aligned}$$

Artinya pada tahun 2012 tingkat realisasi belanja tidak langsung untuk kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang adalah 133,42 %. Berdasarkan kriteria di atas jika diperoleh nilai lebih dari 100% dari tingkat ekonomi berarti pengukuran kinerja tahun 2012 adalah tidak ekonomis.

2) Belanja Langsung

$$\begin{aligned} \text{Tingkat ekonomis} &= \frac{108.549.038.230}{138.962.526.400} \times 100\% \\ &= 78,11\% \end{aligned}$$

Artinya pada tahun 2012 tingkat realisasi belanja langsung untuk kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang adalah 78,11 %. Berdasarkan kriteria di atas jika diperoleh nilai kurang dari 100% dari tingkat ekonomi berarti pengukuran kinerja tahun 2012 adalah ekonomis.

c. Tahun 2013

1) Belanja Tidak Langsung

$$\begin{aligned} \text{Tingkat ekonomi} &= \frac{1.510.239.654}{1.138.853.098} \times 100\% \\ &= 132,61 \% \end{aligned}$$

Artinya pada tahun 2013 tingkat realisasi belanja tidak langsung untuk kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang adalah 132,61 %. Berdasarkan kriteria di atas jika diperoleh nilai lebih dari 100% dari tingkat ekonomi berarti pengukuran kinerja tahun 2013 adalah tidak ekonomis.

2) Belanja Langsung

$$\begin{aligned} \text{Tingkat ekonomis} &= \frac{136.227.550.236}{197.090.486.655} \times 100\% \\ &= 69,11 \% \end{aligned}$$

Artinya pada tahun 2013 tingkat realisasi belanja langsung untuk kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang adalah 69,11 %. Berdasarkan kriteria di atas jika diperoleh nilai kurang dari 100% dari tingkat ekonomi berarti pengukuran kinerja tahun 2013 adalah ekonomis.

Tabel IV.3
Hasil Perhitungan Tingkat Ekonomis

Uraian	Hasil Pencapaian (%)	Ekonomis/tidak ekonomis
Tahun 2011		
Belanja tidak langsung	98,34 %	Ekonomis
Belanja langsung	68%	Ekonomis
Tahun 2012		
Belanja tidak langsung	133,42 %	Tidak Ekonomis
Belanja langsung	78,11 %	Ekonomis
Tahun 2013		
Belanja tidak langsung	132,61 %.	Tidak Ekonomis
Belanja langsung	69,11%	Ekonomis

Sumber: Penulis, 2014.

Berdasarkan tingkat ekonomi realisasi pengeluaran tahun 2011 yaitu belanja tidak langsung 98,34 % berarti sudah ekonomis dan belanja langsung 68 % berarti juga sudah ekonomis. Pada tahun 2012 yaitu belanja tidak langsung 133,42 % berarti tidak ekonomis dan belanja langsung 78,11 % berarti sudah ekonomis. Sedangkan tahun 2013 belanja tidak langsung 132,61 % berarti tidak ekonomis dan belanja langsung 69,11% berarti sudah ekonomis. Berarti Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang dalam realisasi pengeluaran tahun 2011 ekonomis sedangkan tahun tahun 2012 dan 2013 untuk belanja tidak langsung tidak ekonomis.

2. Tingkat Efisiensi

Efisiensi berhubungan dengan pengukuran seberapa besar cara yang digunakan untuk membandingkan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan (cost of output). Suatu kegiatan operasional dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan

penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (spending well).

Dengan pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang tolak ukur yang digunakan adalah anggaran dan realisasi penerimaan alokasi dana kegiatan atau sesuai dengan indikator efisiensi yaitu membandingkan output dengan input dikalikan 100%.

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan}}{\text{Anggaran pendapatan}} \times 100\%$$

a. Tahun 2011

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{39.365.038.356}{57.931.252.373} \times 100 \% \\ &= 67,95 \% \end{aligned}$$

Artinya pada tahun 2011 tingkat efisiensi untuk kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang adalah 67,95%. Berdasarkan kriteria di atas jika diperoleh nilai kurang dari 100% dari tingkat efisiensi berarti pengukuran kinerja tahun 2011 adalah efisien.

b. Tahun 2012

$$\begin{aligned} \text{Tingkat efisiensi} &= \frac{108.549.038.230}{140.273.428.800} \times 100 \% \\ &= 77,38 \% \end{aligned}$$

Artinya pada tahun 2012 tingkat efisiensi untuk kegiatan pembangunan jalan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang adalah 77,38 %. Berdasarkan

kriteria di atas jika diperoleh nilai kurang dari 100% dari tingkat efisiensi berarti pengukuran kinerja tahun 2012 adalah efisien.

c. Tahun 2013

$$\begin{aligned} \text{Tingkat efisiensi} &= \frac{136.227.550.236}{198.229.339.753} \times 100 \% \\ &= 68,72 \% \end{aligned}$$

Artinya pada tahun 2013 tingkat efisiensi untuk kegiatan pembangunan jalan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang adalah 68,72 %. Berdasarkan kriteria di atas jika diperoleh nilai kurang dari 100% dari tingkat efisiensi berarti pengukuran kinerja tahun 2013 adalah efisien.

Tabel IV.4
Hasil Perhitungan Tingkat Efisiensi

Uraian	Hasil Pencapaian (%)	Efisien/ tidak efisien
Tahun 2011	67,95 %	Efisien
Tahun 2012	77,38 %	Efisien
Tahun 2013	68,72 %	Efisien

Sumber: penulis, 2014.

Berdasarkan tingkat efisien Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2011-2013 menunjukkan tingkat efisien yang baik, karena kurang dari 100%.

3. Tingkat Efektivitas

efektivitas (hasil guna) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output, untuk mengukur tingkat

efektivitas dalam pengelolaan keuangan dengan melihat perbandingan anggaran pendapatan dengan realisasinya dikali 100%.

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Anggaran pendapatan}}{\text{Realisasi pendapatan}} \times 100\%$$

Dengan rumus di atas dapat dilakukan analisis tingkat efektivitas dalam penggunaan dana alokasi APBD oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang setiap tahunnya sebagai berikut:

a. Tahun 2011

$$\begin{aligned} \text{Tingkat efektivitas} &= \frac{57.931.252.373}{39.408.954.189} \times 100\% \\ &= 147\% \end{aligned}$$

Artinya pada tahun 2011 tingkat pencapaian kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang adalah 147 %. Berdasarkan kriteria di atas jika diperoleh nilai lebih dari 100% dari tingkat efisiensi berarti pengukuran kinerja tahun 2011 adalah tidak efisien.

b. Tahun 2012

$$\begin{aligned} \text{Tingkat efektivitas} &= \frac{140.273.428.800}{110.298.170.212} \times 100\% \\ &= 127,17\% \end{aligned}$$

Artinya pada tahun 2012 tingkat pencapaian kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang adalah 127,17 %. Berdasarkan kriteria di atas jika diperoleh nilai

lebih dari 100% dari tingkat efisiensi berarti pengukuran kinerja tahun 2012 adalah tidak efisien.

c. Tahun 2013

$$\begin{aligned} \text{Tingkat efektivitas} &= \frac{198.229.339.753}{137.737.789.890} \times 100\% \\ &= 143,91\% \end{aligned}$$

Artinya pada tahun 2013 tingkat pencapaian kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang adalah 143,91 %. Berdasarkan kriteria di atas jika diperoleh nilai lebih dari 100% dari tingkat efisiensi berarti pengukuran kinerja tahun 2013 adalah tidak efisien.

Tabel IV.5
Hasil Perhitungan Tingkat Efektivitas

Uraian	Hasil Pencapaian (%)	Efektif/tidak efektif
Tahun 2011	147 %	Tidak efektif
Tahun 2012	127,17 %	Tidak efektif
Tahun 2013	143,91 %	Tidak efektif

Sumber: penulis, 2014.

Berdasarkan tingkat pencapaian realisasi pendapatan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2011-2013 menunjukkan ketidakefektifitasan dalam kinerjanya, karena lebih dari 100%.

Penyebab tingkat efektivitas pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang tidak tercapai karena adanya pencapaian sasaran dari kegiatan yang telah ditetapkan tidak mencapai target yang hendak

dicapai. Kegiatan itu meliputi program pembangunan jalan dan jembatan serta program rehabilitasi atau pemeliharaan jalan dan jembatan.

4. *Outcome*

Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat atau mengukur kualitas *output* terhadap dampak yang dihasilkan. Pengukuran *outcome* memiliki dua peran yaitu Peran *Retrospektif* terkait dengan penilaian kinerja masa lalu, analisis *retrospektif* memberikan bukti terhadap realisasi yang baik (*good management*). Bukti tersebut dapat menjadi dasar untuk menentukan target di masa yang akan datang dan mendorong untuk menggunakan praktik yang terbaik. Dan Peran *Prospektif* terkait dengan perencanaan kinerja di masa yang akan datang. Sebagai pengukuran *outcome* digunakan untuk mengarahkan keputusan alokasi sumber daya publik. Analisis memberikan bukti terhadap praktik yang baik. Bukti tersebut dapat menjadi dasar untuk menetapkan target di masa yang akan datang dan mendorong untuk menggunakan praktik yang terbaik.

Mengukur *outcome* atau dampak kegiatan yang telah dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang terhadap masyarakat yaitu dengan menyebarkan angket mengenai jalan dan jembatan yang telah di buat.

Setiap respon menerima 1 (satu) eksemplar kuesioner yang berisikan dampak dari program pembangunan jalan dan jembatan dan materi

penelitian engan pilihan jawaban sangat setuju (SS), setuju (S), cukup setuju (CS), kurang setuju (KS), tidak setuju (TS).

Penyebaran angket pengukuran dampak jalan dilakukan di jalan yang di bangun pada tahun 2011-2013 setiap tahun di ambil 1 (satu) jalan. Dan Penyebaran angket pengukuran dampak jembatan dilakukan di jembatan yang di bangun pada tahun 2011-2013 setiap tahun di ambil 1 (satu) jembatan.

Dampak dari pembangunan jalan dan jembatan yang telah di buat dapat digambarkan dengan hasil penyebaran kuesioner berikut.

a. Jalan

Tabel IV.6
Pertanyaan Mengenai Dampak Pembangunan Jalan
Tahun 2011

No	Pertanyaan	SS	S	CS	KS	TS	Total
1	Tingkat kecelakaan di daerah ini semakin minim karena kondisi jalan yang semakin baik dan tidak berlubang	0	7	9	9	5	30
2	Saya merasa lebih nyaman berkendara/berjalan kaki di jalan ini karena kondisi jalan yang semakin baik	0	5	9	11	5	30
3	Jalan ini semakin memudahkan kami melakukan aktifitas perekonomian kami	7	6	8	9	0	30
4	Para pengendara kendaraan yang melintasi jalan ini dapat lebih mudah mengontrol kecepatan yang sesuai.	0	5	9	10	6	30
5	Tingkat kemacetan di wilayah ini berkurang karena kondisi jalan yang semakin baik dan tidak berlubang.	0	0	10	17	3	30
Total jawaban		7	23	45	56	19	150
Total jawaban dalam persentase (%)		4,66	15,33	30	37,33	12,66	100

Sumber: hasil pengolahan penulis, 2014.

Pada tabel IV.6 penyebaran dilakukan di jl. Lintas Sumatera yang dibangun pada tahun 2011. Pada tabel ini menunjukkan bahwa masyarakat yang menyatakan sangat setuju (SS) 4,66%, setuju (S) 15,33%, cukup setuju (CS) 30%, kurang setuju (KS) 37,33%, dan tidak setuju (TS) 12,66%. Hal ini menunjukkan bahwa respon masyarakat yang dominan menyatakan

kurang setuju (KS) 37,33%, bahwa pembangunan jalan di wilayah Jl. Lintas Sumaterayang telah di buat pada tahun 2011 kurang bermanfaat bagi masyarakat.

Tabel IV.7
Pertanyaan Mengenai Dampak Pembangunan Jalan
Tahun 2012

No	Pertanyaan	SS	S	CS	KS	TS	Total
1	Tingkat kecelakaan di daerah ini semakin minim karena kondisi jalan yang semakin baik dan tidak berlubang	2	3	5	15	5	30
2	Saya merasa lebih nyaman berkendara/berjalan kaki di jalan ini karena kondisi jalan yang semakin baik	6	4	5	12	3	30
3	Jalan ini semakin memudahkan kami melakukan aktifitas perekonomian kami	4	15	5	6	0	30
4	Para pengendara kendaraan yang melintasi jalan ini dapat lebih mudah mengontrol kecepatan yang sesuai.	0	2	5	18	5	30
5	Tingkat kemacetan di wilayah ini berkurang karena kondisi jalan yang semakin baik dan tidak berlubang.	4	6	8	9	3	30
Total jawaban		16	30	28	60	16	150
Total jawaban dalam persentase (%)		10,66	20	18,68	40	10,66	100

Sumber: hasil pengolahan penulis, 2014.

Pada tabel IV.7 penyebaran dilakukan di jl. Nurdin Penji yang dibangun pada tahun 2012. Pada tabel ini menunjukkan bahwa masyarakat

yang menyatakan sangat setuju (SS) 10,66%, setuju (S) 20%, cukup setuju (CS) 18,68%, kurang setuju (KS) 40%, dan tidak setuju (TS) 10,66%. hal ini menunjukkan bahwa respon masyarakat yang dominan menyatakan kurang setuju (KS) 40%, bahwa pembangunan jalan di wilayah Jl. Nurdin Penji yang telah di buat pada tahun 2012 kurang bermanfaat bagi masyarakat.

Hal yang menyebabkan pembangunan jalan di Kabupaten Empat lawang kurang bermanfaat yakni karena masih banyak jalan yang berlubang disebabkan adanya pencapaian sasaran dari kegiatan pembangunan jalan dan rehabilitas atau pemeliharaan jalan yang telah di tetapkan tidak mencapai target yang hendak dicapai. Masyarakat akan lebih merasakan manfaat dari pembangunan jalan apabila pihak Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat lawang dalam kegiatan pengontrolan hasil pembangunan lebih di tingkatkan lagi sehingga jalan yang sudah mulai rusak dan berlubang dapat segera di perbaiki.

Tabel IV.8
Pertanyaan Mengenai Dampak Pembangunan Jalan
Tahun 2013

No	Pertanyaan	SS	S	CS	KS	TS	Total
1	Tingkat kecelakaan di daerah ini semakin minim karena kondisi jalan yang semakin baik dan tidak berlubang	5	15	5	3	2	30
2	Saya merasa lebih nyaman berkendara/berjalan kaki di jalan ini karena kondisi jalan yang semakin baik	5	18	6	1	0	30
3	Jalan ini semakin memudahkan kami melakukan aktifitas perekonomian kami	5	20	5	0	0	30
4	Para pengendara kendaraan yang melintasi jalan ini dapat lebih mudah mengontrol kecepatan yang sesuai.	4	11	8	5	2	30
5	Tingkat kemacetan di wilayah ini berkurang karena kondisi jalan yang semakin baik dan tidak berlubang.	2	7	5	14	2	30
Jumlah jawaban		21	71	29	23	6	150
Jumlah jawaban dalam persentase (%)		14	47,33	19,33	15,34	4	100

Sumber: hasil pengolahan penulis, 2014

Pada tabel IV.8 penyebaran dilakukan di jl. Letda Abu Bakardi yang dibangun pada tahun 2013. Pada tabel ini menunjukkan bahwa masyarakat yang menyatakan sangat setuju (SS) 14%, setuju (S) 47,33%, cukup setuju (CS) 19,33%, kurang setuju (KS) 15,34%, dan tidak setuju (TS) 4%. hal ini menunjukkan bahwa respon masyarakat yang dominan menyatakan setuju (S)

47,33%, bahwa pembangunan jalan di wilayah Jl. Letda Abu Bakardi yang telah di buat pada tahun 2013 bermanfaat bagi masyarakat.

b. Jembatan

Tabel IV.9
Pertanyaan Mengenai Dampak Pembangunan Jembatan
Tahun 2011

No	Pertanyaan	SS	S	CS	KS	TS	Total
1	Dengan jembatan penghubung jalan ini akses menuju pedesaan lain/luar kota lebih mudah, nyaman, dan aman.	2	3	4	15	6	30
2	Tingkat kecelakaan di jembatan ini minim karena kondisi jalan jembatan yang baik dan tidak berlobang.	3	4	5	12	6	30
3	Setelah di bangunnya jembatan permanen ini tingkat kecelakaan akibat bencana alam berkurang.	5	10	9	5	1	30
4	Setelah di bangunnya jembatan ini kegiatan perekonomian masyarakat lebih mudah dan berdampak pada pertumbuhan perekonomian meningkat.	0	2	5	18	5	30
5	Tingkat kemacetan di sekitar wilayah jembatan berkurang karena kondisi jalan yang baik.	5	6	10	7	2	30
Total jawaban		15	25	33	57	20	250
Total jawaban dalam persentase (%)		10	16,67	22	38	13,33	100

Sumber: hasil pengolahan penulis, 2014.

Pada tabel IV.9, penyebaran dilakukan di Jembatan Air Lintang penghubung Pendopo ke Lintang yang dibangun pada tahun 2011. Pada tabel ini menunjukkan bahwa masyarakat yang menyatakan sangat setuju (SS) 10%, setuju (S) 16,67%, cukup setuju (CS) 22%, kurang setuju (KS) 38%, dan tidak setuju (TS) 13,33%. hal ini menunjukkan bahwa respon

masyarakat yang dominan menyatakan kurang setuju (KS) 38%, bahwa pembangunan Jembatan Air Lintang penghubung Pendopo ke Lintang yang dibangun pada tahun 2011 ini kurang bermanfaat bagi masyarakat.

Hal yang menyebabkan pembangunan jembatan Air Lintang penghubung Pendopo dan Lintang kurang bermanfaat yakni karena jalan jembatan yang berlubang disebabkan adanya pencapaian sasaran dari kegiatan pembangunan jalan dan rehabilitasi atau pemeliharaan jalan yang telah ditetapkan tidak mencapai target yang hendak dicapai. Masyarakat akan lebih merasakan manfaat dari pembangunan jembatan ini apabila pihak Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang dalam kegiatan pengontrolan hasil pembangunan lebih di tingkatkan lagi sehingga jembatan yang sudah mulai rusak dan berlubang dapat segera diperbaiki.

Tabel IV.10
Pertanyaan Mengenai Dampak Pembangunan Jembatan
Tahun 2012

No	Pertanyaan	SS	S	CS	KS	TS	Total
1	Dengan jembatan penghubung jalan ini akses menuju pedesaan lain/luar kota lebih mudah, nyaman, dan aman.	8	19	3	0	0	30
2	Tingkat kecelakaan di jembatan ini minim karena kondisi jalan jembatan yang baik dan tidak berlobang.	8	9	9	4	0	30
	Setelah di bangunnya jembatan permanen ini tingkat kecelakaan akibat bencana alam berkurang.	15	15	0	0	0	30
4	Setelah di bangunnya jembatan ini kegiatan perekonomian masyarakat lebih mudah dan berdampak pada pertumbuhan perekonomian meningkat.	8	10	6	5	1	30
5	Tingkat kemacetan di sekitar wilayah jembatan berkurang karena kondisi jalan yang baik.	8	9	8	5	0	30
Jumlah jawaban		47	62	26	14	1	150
Jumlah jawaban dalam persentase (%)		31,3 3	41,3 3	17,3 3	9,33	0,68	100

Pada tabel IV.10, penyebaran dilakukan di Jembatan Gantung penghubung Dusun Terusan Baru dengan Dusun Air Sengguring yang dibangun pada tahun 2012. Pada tabel ini menunjukkan bahwa masyarakat yang menyatakan sangat setuju (SS) 31,33%, setuju (S) 41,33%, cukup setuju (CS) 17,33%, kurang setuju (KS) 9,33%, dan tidak setuju (TS) 0,68%. Hal ini menunjukkan bahwa respon masyarakat yang dominan

menyatakan setuju (S) 38%, bahwa pembangunan Jembatan Gantung penghubung Desa Tnjung Kupang dan Desa Kemang Manis yang dibangun pada tahun 2012 ini bermanfaat bagi masyarakat.

Tabel IV.11
Pertanyaan Mengenai Dampak Pembangunan Jembatan
Tahun 2013

No	Pertanyaan	SS	S	CS	KS	TS	Total
1	Dengan jembatan penghubung jalan ini akses menuju pedesaan lain/luar kota lebih mudah, nyaman, dan aman.	20	7	3	0	0	30
2	Tingkat kecelakaan di jembatan ini minim karena kondisi jalan jembatan yang baik dan tidak berlobang.	10	16	4	0	0	30
3	Setelah di bangunnya jembatan permanen ini tingkat kecelakaan akibat bencana alam berkurang.	22	8	0	0	0	30
4	Setelah di bangunnya jembatan ini kegiatan perekonomian masyarakat lebih mudah dan berdampak pada pertumbuhan perekonomian meningkat.	9	11	10	0	0	30
5	Tingkat kemacetan di sekitar wilayah jembatan berkurang karena kondisi jalan yang baik.	11	12	7	0	0	30
Jumlah jawaban		72	54	24	0	0	150
Jumlah jawaban dalam persentase (%)		48	36	16	0	0	100

Sumber: hasil pengolahan penulis, 2014

Pada tabel IV.11, penyebaran kuesioner dilakukan di wilayah sekitar Jembatan Kuning penghubung Desa Tnjung Kupang dan Desa Kemang Manis yang dibangun pada tahun 2013. Pada tabel ini menunjukkan bahwa masyarakat yang menyatakan sangat setuju (SS) 48%, setuju (S) 36%, cukup setuju (CS) 16%, kurang setuju (KS) 0%, dan tidak setuju (TS) 0%. hal ini menunjukkan bahwa respon masyarakat yang dominan menyatakan

sangat setuju (SS) sebesar 48%, bahwa pembangunan Jembatan Kuning penghubung Desa Tnjung Kupang dan Desa Kemang Manis yang dibangun pada tahun 2013 ini sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Pengukuran kinerja dengan menggunakan value for money pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang berdasarkan pengukuran tingkat ekonomis pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang tahun 2011 pengeluaran belanja langsung sebesar 68%, dan belanja tidak langsung sebesar 98,34%. Pada tahun 2012 tingkat ekonomi realisasi pengeluaran belanja langsung sebesar 78,11%, dan belanja tidak langsung sebesar 133,42%. Pada tahun 2013 tingkat ekonomi realisasi pengeluaran belanja langsung sebesar 69,11%, dan belanja tidak langsung sebesar 132,61%. Berarti dalam melakukan pengeluaran belanja tidak langsung pada tahun 2012 dan 2013 dilakukan tidak ekonomis karena berdasarkan kriteria yang diperoleh tingkat pencapaian lebih dari 100%. Sementara tahun 2011 tingkat pencapaian yang dilakukan ekonomis karena berdasarkan kriteria yang diperoleh tingkat pencapaian kurang dari 100%.

Berdasarkan tingkat efisiensi realisasi pengeluaran dan pendapatan tahun 2011 adalah sebesar 67,95%, pada tahun 2012 adalah sebesar 77,38%, dan pada tahun 2013 adalah sebesar 68,72%. Berarti dalam hal tingkat pencapaian kegiatannya telah dilakukan secara efisien, karena berdasarkan kriteria yang diperoleh dari tahun 2011-2013 hasil yang dicapai kurang dari 100%.

Berdasarkan pengukuran tingkat efektivitas pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang tahun 2011 adalah 147%, pada tahun 2012 adalah 127,17%, dan tahun 2013 adalah 143,91%. Berarti dalam hal tingkat pencapaian kegiatannya telah dilakukan secara tidak efektif, karena berdasarkan kriteria yang diperoleh dari tahun 2011-2013 hasil yang dicapai lebih dari 100%.

Dan berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat atau outcome dari pembangunan jalan dan jembatan yang telah dibuat cukup bermanfaat namun tingkat kepuasan masyarakat masih kurang dikarenakan masih banyak jalan yang rusak dan berlubang.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan uarian pada bab empat, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang dalam penggunaan alokasi dan APBD tahun 2011-2013 bila diukur dengan menggunakan metode value for money telah dilakukan kurang baik, hal ini dapat dilihat dari pengukuran kinerja sebagai berikut:

1. Ekonomis

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang dalam melakukan pengeluaran belanja tidak langsung pada tahun 2012 dan 2013 dilakukan tidak ekonomis karena berdasarkan kriteria yang diperoleh tingkat pencapaian lebih dari 100%. Sementara tahun 2011 tingkat pencapaian yang dilakukan ekonomis karena berdasarkan kriteria yang diperoleh tingkat pencapaian kurang dari 100%.

2. Efisiensi

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang dalam hal tingkat pencapaian kegiatannya telah dilakukan secara efisien, karena berdasarkan kriteria yang diperoleh dari tahun 2011-2013 hasil yang dicapai kurang dari 100%.

3. Efektivitas

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang dalam hal tingkat pencapaian kegiatannya telah dilakukan secara tidak efektif, karena

berdasarkan kriteria yang diperoleh dari tahun 2011-2013 hasil yang dicapai lebih dari 100%.

4. *Outcome*

Berdasarkan pengukuran *outcome* atau dampak dari kegiatan yang telah di capai oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang dalam kegiatan pembuatan dan rehabilitas atau pemeliharaan jalan dan jembatan yang telah dilakukan. Masyarakat masih merasa kurang puas dengan hasil kegiatan itu, hal ini karena adanya pencapaian sasaran dari kegiatan pembangunan dan rehabilitas atau pemeliharaan jalan dan jembatan yang telah di tetapkan tidak mencapai target yang hendak dicapai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan sebelumnya, maka penulis akan memberikan saran yang mungkin akan bermanfaat bagi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya petugas harus lebih cermat dalam pengelolaan belanja tidak langsung sehingga realisasi pengeluaran yang dikeluarkan nantinya dapat lebih ekonomis.
2. Rutin mengotrol kondisi jalan dan jembatan yang rusak dan hendak di perbaiki agar kegiatan pembangunan yang dilakukan menjadi sangat bermanfaat bagi masyarakat nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2006. **Pengukuran Kinerja Sektor Publik**, Salemba Empat, Yogyakarta.
- Bambang prasetyo dan Lina M.J. 2010. **Metode Penelitian Kuantitatif, Teori dan Aplikasi**, PT. Raja Grafindo Persada, jakarta.
- Deni Riski Pratama. 2012. **Analisis Pengukuran Kinerja Dalam Rangka Penerapan Metode Value For Money Pada Badan Kepegawaian Daerah Dan Diklat Kota Palembang**. Skripsi tidak diterbitkan. Palembang: Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Indra Bastian. 2001. **Akuntansi Sektor Publik**, Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta.
- Indra Bastian. 2006. **Akuntansi Sektor Publik**, Erlangga, Yogyakarta.
- Lin, Nan Ahli Bahasa W. Gulo. 2002. **Metodologi Penelitian**. PT. Gramedia Widiasarna Indonesia, Jakarta.
- Lingga Marta Syofyana. 2012. **Pengukuran Kinerja Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Dengan Konsep 3E (Value For Money) Pada Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas**. Skripsi tidak diterbitkan. Palembang: Program Studi Akuntansi. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Mardiasmo. 2009. **Akuntansi Sektor Publik**, Edisi Keempat, Andi, Yogyakarta.
- Mudrajad Kuncoro. 2003. **Metode Penelitian Akuntansi**, BPFE, Yogyakarta.
- Muhammad Mahsun. 2006. **Pengukuran Kinerja Sektor Publik**, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta.
- Nur Indrianto dan Bambang Supomo. 2009. **Metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen**, Edisi pertama. BPFE, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2009. **Metode Penelitian Bisnis**, Alfabeta, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2013. **Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D**. CV. Alfabeta. Bandung.

Kuesioner I

identitas responden. Isilah titik titik di bawah ini!

Nama :

Alamat :

.....

Usia saat ini : (Tahun)

Jenis kelamin : laki-laki / perempuan

Pertanyaan ini adalah untuk mengetahui outcome atas respon masyarakat terhadap program pembangunan jalan.

No	Pertanyaan	Sangat Setuju	Setuju	Cukup Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju
1.	Tingkat kecelakaan di daerah ini semakin minim karena kondisi jalan yang baik dan tidak berlubang.					
2.	Saya merasa lebih nyaman berkendara/berjalan kaki di jalan ini karena kondisi jalan yang semakin baik.					
3.	Jalan ini semakin memudahkan kami melakukan aktifitas perekonomian kami.					
4.	Para pengendara kendaraan yang melintasi jalan ini dapat lebih mudah mengontrol kecepatan yang sesuai.					
5.	Tingkat kemacetan di wilayah ini berkurang karena kondisi jalan yang semakin baik dan tidak berlubang.					

Kuesioner II

identitas responden. Isilah titik titik di bawah ini!

Nama :

Alamat :
.....

Usia saat ini : (Tahun)

Jenis kelamin : laki-laki / perempuan

Pertanyaan ini adalah untuk mengetahui outcome atas respon masyarakat terhadap program pembangunan jembatan.

No	Pertanyaan	Sangat Setuju	Setuju	Cukup Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju
1.	Dengan jembatan penghubung jalan ini akses menuju pedesaan lain/luar kota lebih mudah, nyaman, dan aman.					
2.	Tingkat kecelakaan di jembatan ini minim karena kondisi jalan jembatan yang baik dan tidak berlobang.					
3.	Dengan jembatan permanen ini tingkat kecelakaan akibat bencana alam berkurang.					
4.	Setelah dibangunnya jembatan ini kegiatan perekonomian masyarakat lebih mudah dan berdampak pada pertumbuhan perekonomian meningkat.					
5.	Tingkat kemacetan di sekitar wilayah jembatan berkurang karena kondisi jalan yang baik.					

Kuesioner Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan di jl. Letda Abu Bakardin

No	Nama	Umur (Tahun)	Alamat
1	Stris	50	Desa Muara Kalangan
2	Suwah	35	Desa Muara Kalangan
3	Rus Modong	50	Desa Muara Kalangan
4	Nur Hasan	32	Desa Muara Kalangan
5	Nur Kowi	36	Desa Muara Kalangan
6	Muslih	42	Desa Muara Kalangan
7	Rusdi	40	Desa Muara Kalangan
8	Sutarwik	38	Desa Muara Kalangan
9	Abdul RM	39	Desa Muara Kalangan
10	Marsudi	34	Desa Muara Kalangan
11	Nursoli	34	Desa Muara Kalangan
12	Nurhadi	34	Desa Muara Kalangan
13	Aliman	25	Desa Muara Kalangan
14	Nurjhoni	26	Desa Muara Kalangan
15	Syainudin	26	Desa Muara Kalangan
16	Karmila	24	Desa Ujung Alih
17	Abu	39	Desa Ujung Alih
18	Amri	33	Desa Ujung Alih
19	Sutar	41	Desa Ujung Alih
20	Suprpto	40	Desa Ujung Alih
21	Suprianto	29	Desa Ujung Alih
22	Mulyati	47	Desa Ujung Alih
23	Darwis	45	Desa Ujung Alih
24	Junaidi	37	Desa Ujung Alih
25	Yusri	40	Desa Ujung Alih
26	Dewi	26	Desa Ujung Alih
27	Lisa	34	Desa Ujung Alih
28	Nelisa	28	Desa Ujung Alih
29	Intan	20	Desa Ujung Alih
30	Suparman	30	Desa Ujung Alih

Kuesioner Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan di jl. Lintas Sumatera

No	Nama	Umur (Tahun)	Alamat
1	Hadnana	37	Desa Sugiwaras
2	Eni Kusriani	27	Desa Sugiwaras
3	Heryati	29	Desa Sugiwaras
4	Maman	28	Desa Sugiwaras
5	Tarsa	34	Desa Sugiwaras
6	Ruslan	39	Desa Sugiwaras
7	Tarmudi	40	Desa Sugiwaras
8	Samsul Jenawan	41	Desa Sugiwaras
9	Sunaryo	44	Desa Sugiwaras
10	Leri Hopies Sianturi	35	Desa Sugiwaras
11	Hasanudin	49	Desa Sugiwaras
12	Laila Sari	27	Desa Sugiwaras
13	Uni	26	Desa Sugiwaras
14	Nanik	24	Desa Sugiwaras
15	Sumiyati	45	Desa Sugiwaras
16	Debi	29	Desa Endikat Ilir
17	Sarman	46	Desa Endikat Ilir
18	Firdaus	44	Desa Endikat Ilir
19	Aprianti	35	Desa Endikat Ilir
20	Karso prakowo	47	Desa Endikat Ilir
21	Suwardi	46	Desa Endikat Ilir
22	Kuncoro	48	Desa Endikat Ilir
23	Tina	40	Desa Endikat Ilir
24	Meliyana	36	Desa Endikat Ilir
25	Ariyani	30	Desa Endikat Ilir
26	Anawan	27	Desa Endikat Ilir
27	Ferdi	31	Desa Endikat Ilir
28	Efendi	41	Desa Endikat Ilir
29	Suyatmo	30	Desa Endikat Ilir
30	Fran	29	Desa Endikat Ilir

Kuesioner Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan di jl. Nurdin Penji

No	Nama	Umur (Tahun)	Alamat
1	Sriyono	36	Desa Tanjung Raya
2	Bimo Saino	24	Desa Tanjung Raya
3	Sartono	29	Desa Tanjung Raya
4	Sopiyan	26	Desa Tanjung Raya
5	Yati	27	Desa Tanjung Raya
6	Saiman	37	Desa Tanjung Raya
7	Sutono	35	Desa Tanjung Raya
8	Warsa	45	Desa Tanjung Raya
9	Yanto	44	Desa Tanjung Raya
10	Irwan	40	Desa Tanjung Raya
11	Surahmi	39	Desa Tanjung Raya
12	Maulana	35	Desa Tanjung Raya
13	Dwi kinata	31	Desa Tanjung Raya
14	Sutiman	41	Desa Tanjung Raya
15	Edi suratmo	41	Desa Tanjung Raya
16	Guntur	40	Desa Tanjung Agung
17	Sanusi	28	Desa Tanjung Agung
18	Sugiyono	26	Desa Tanjung Agung
19	Jonathan	20	Desa Tanjung Agung
20	Lina herlina	21	Desa Tanjung Agung
21	Iin	22	Desa Tanjung Agung
22	Misran	40	Desa Tanjung Agung
23	Septian	30	Desa Tanjung Agung
24	Sumirah	33	Desa Tanjung Agung
25	Basuki	25	Desa Tanjung Agung
26	Anwar	29	Desa Tanjung Agung
27	Sri winda	27	Desa Tanjung Agung
28	Bagus Susanto	40	Desa Tanjung Agung
29	Rudi	29	Desa Tanjung Agung
30	Siti Juliana	30	Desa Tanjung Agung

Kuesioner Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Air Lintang

No	Nama	Umur (Tahun)	Alamat
1	Ahmad Sopian Sauri	36	Penyumbang Pendopo
2	M. Sumino	40	Penyumbang Pendopo
3	Suripman	41	Penyumbang Pendopo
4	Mardianto	44	Penyumbang Pendopo
5	Suganda	50	Penyumbang Pendopo
6	Sriyono	49	Penyumbang Pendopo
7	Legino	39	Penyumbang Pendopo
8	Siti Jairati	41	Penyumbang Pendopo
9	Umar Muhtar	32	Penyumbang Pendopo
10	Muhroni	38	Penyumbang Pendopo
11	Supriyanto	35	Penyumbang Pendopo
12	Edi	29	Penyumbang Pendopo
13	Effendi	26	Penyumbang Pendopo
14	Ikhsan	25	Penyumbang Pendopo
15	Agus	24	Penyumbang Pendopo
16	Fahmi	22	Desa Tenggarasa
17	Meilisa	24	Desa Tenggarasa
18	Novi	25	Desa Tenggarasa
19	Sari Handayani	25	Desa Tenggarasa
20	Ayu Ria Kandi	26	Desa Tenggarasa
21	Yupita	24	Desa Tenggarasa
22	Sari	26	Desa Tenggarasa
23	Edwin	25	Desa Tenggarasa
24	Toyo	27	Desa Tenggarasa
25	Suparman	33	Desa Tenggarasa
26	Neti	40	Desa Tenggarasa
27	Nelisa	28	Desa Tenggarasa
28	Ningsih	26	Desa Tenggarasa
29	Gimun	44	Desa Tenggarasa
30	Nawar	43	Desa Tenggarasa

Kuesioner Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan di Jembatan Gantung

No	Nama	Umur (Tahun)	Alamat
1	Imron	40	Dusun Terusan Baru
2	Yati	41	Dusun Terusan Baru
3	Lisdalena	37	Dusun Terusan Baru
4	Suwito	50	Dusun Terusan Baru
5	Herman	47	Dusun Terusan Baru
6	Galang	38	Dusun Terusan Baru
7	Nayla	35	Dusun Terusan Baru
8	Tristan	31	Dusun Terusan Baru
9	Digo	25	Dusun Terusan Baru
10	Sisi	26	Dusun Terusan Baru
11	Daffa	29	Dusun Terusan Baru
12	Sri sulastri	28	Dusun Terusan Baru
13	Asri	22	Dusun Terusan Baru
14	Mega	25	Dusun Terusan Baru
15	Nova	24	Dusun Terusan Baru
16	Megri Fransiska	26	Dusun Air Sengguring
17	Nanda	25	Dusun Air Sengguring
18	Gema	28	Dusun Air Sengguring
19	Cahya	26	Dusun Air Sengguring
20	Eny mulyani	29	Dusun Air Sengguring
21	Anggi.S	26	Dusun Air Sengguring
22	Novian	24	Dusun Air Sengguring
23	Haris	22	Dusun Air Sengguring
24	Ikhwan	26	Dusun Air Sengguring
25	Akimmishola	21	Dusun Air Sengguring
26	Realdy eka saputra	25	Dusun Air Sengguring
27	Nugrah	25	Dusun Air Sengguring
28	Oktaviansyah	26	Dusun Air Sengguring
29	Fery	26	Dusun Air Sengguring
30	Aldo	26	Dusun Air Sengguring

Kuesioner Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Kuning

No	Nama	Umur (Tahun)	Alamat
1	Rivaldo	28	Desa Tanjung Kupang
2	Asnan	25	Desa Tanjung Kupang
3	Nurhayati	26	Desa Tanjung Kupang
4	Annisa	26	Desa Tanjung Kupang
5	Yuni	27	Desa Tanjung Kupang
6	Mawardi	25	Desa Tanjung Kupang
7	Julian	26	Desa Tanjung Kupang
8	Nursinah	35	Desa Tanjung Kupang
9	Dedi	32	Desa Tanjung Kupang
10	Deden	36	Desa Tanjung Kupang
11	Handoyo prayoga	22	Desa Tanjung Kupang
12	Handoko wiguna	21	Desa Tanjung Kupang
13	Dianugraha	25	Desa Tanjung Kupang
14	Franda	25	Desa Tanjung Kupang
15	Susmiati	41	Desa Tanjung Kupang
16	Leni	40	Desa Kemang Manis
17	Budiman	35	Desa Kemang Manis
18	Nurmana	33	Desa Kemang Manis
19	Era fazila	37	Desa Kemang Manis
20	Ririn nurmalasari	25	Desa Kemang Manis
21	Rizki	25	Desa Kemang Manis
22	Veli	27	Desa Kemang Manis
23	Egi	26	Desa Kemang Manis
24	Ulva	28	Desa Kemang Manis
25	Anggie	22	Desa Kemang Manis
26	Zawawi	44	Desa Kemang Manis
27	Abdul	41	Desa Kemang Manis
28	Sutarjo	39	Desa Kemang Manis
29	Raden	30	Desa Kemang Manis
30	Levi	32	Desa Kemang Manis



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
Jalan Lintas Sumatera Km.3,5 Tlg. Banyu Tlpm/Fax. 0702 7320007 Tebing Tinggi
Kab. Empat Lawang



Empat Lawang, Januari 2014

Nomor : 900/15/DPU/2014
Jumlah Lembaran : 1 (satu)
Materi : Pemberian Data

Kepada YTH
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Di-
Palembang

Membalas surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis nomor : 161 / 6 – 17/FE-
MP/XI/2014. Hal mohon bantuan data untuk penyusunan skripsi, pada prinsipnya kami siap
membantu saudara:

Nama : Sri Megawati
No. M : 22 2010 196
Jurusan : Akuntansi

Memberikan data yang dibutuhkan guna kepentingan penyusunan skripsi.

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

An. KEPALA DINAS PEKERJAAN
UMUM BINA MARGA



H. Fauzi, ST, M.Si

Nip. 195612111980031012



KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

MAHASISWA : SRI MEGAWATI	PEMBIMBING
: 22 2010 196	KETUA : Muhammad Fahmi, S.E, M.Si
GRAM STUDI : Akuntansi	ANGGOTA :
JUL SKRIPSI : Pengukuran Kinerja dengan Menggunakan Metode Value for Money pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang	

TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
		KETUA	ANGGOTA	
1/6/2014	bab 1, 2, 3.	<i>[Signature]</i>		publikasi
13/6/2014	business plan.	<i>[Signature]</i>		publikasi
5/7/2014	pendahuluan -	<i>[Signature]</i>		publikasi
18/7/2014	Outcome & kesimpulan	<i>[Signature]</i>		publikasi
22/7/2014	file & Abstrak.	<i>[Signature]</i>		& Acc diseminasi

CATATAN :
 Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi
 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang
 Pada tanggal : / /
 a.n. Dekan

 Rosalina Ghazali, S.E, Ak., M.Si



ECONOMICS FACULTY
UNIVERSITY OF MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LANGUAGE INSTITUTE & CAREER

Jl. Ahmad Yani - 14 Ulu Palembang
 Telp. 0711.511433
 e-mail: lbpk_feump@yahoo.com

TOEFL PREDICTION TEST

FULL NAME	TIME TAKEN
SRI MEGAWATI	08.00-10.00 AM
SEX	DATE OF BIRTH
M/F	D / M / Y
F	25-Jan-1993
	TEST DATE
	15-Mar-2014

TOEFL PREDICTION SCORES			
SECTION 1	SECTION 2	SECTION 3	TOTAL SCORE
45	41	37	410

EXAMINEE'S NUMBER
1564

Prof. Dr. Indawan Syahri, M.Pd.

DATE OF REPORT
24/03/2014



Muhammad Fahmi, S.E., M.Si

CHAIRMAN

Consultant

When properly signed, this report certifies that the candidate whose name appears above has taken the TOEFL prediction Test of Economics faculty - language institute & career under secure conditions. This report is confidential

**PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

STATUS DISAMAKAN / TERAKREDITASI

لجنة التفتيش

PIGAM

No.262/H-4/PPKKN/UMP/IX/2013

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palembang menerangkan bahwa :

Nama : Sri Megawati
Nomor Pokok Mahasiswa : 22 2010 196
Fakultas/Jurusan : Ekonomi / Akuntansi
Tempat Tgl. Lahir : Pagarlalam, 25-01-1993

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-5 yang dilaksanakan dari tanggal 16 Juli sampai dengan 29 Agustus 2013 bertempat di:

Kelurahan/Desa : 1 Ilir
Kecamatan : Ilir Timur II
Kota/Kabupaten : Palembang
Provinsi : (A)



H. M. Idris, S.E., M.Si.



Ir. Alhanannasir, M.Si.



AKREDITASI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

INSTITUSI PERGOUDIRAN TINGGI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMERINTAHAN (DIII)

Nomor: 027/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2014 (B)
Nomor: 044/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2014 (B)
Nomor: 044/SK/BAN-PT/Ak-XI/51/II/2011 (B)
Nomor: 005/SK/BAN-PT/Ak-X/Dipl-III/VI/2010 (B)

Email: umpp@umppad.com

Website: umppalembang.net/feump

Alamat: Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711) 511433 Faksimile (0711) 518018



LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN

Hari/Tanggal : Selasa/19 Agustus 2014
 Waktu : 13.00-16.00
 Nama : Sri Megawati
 Nim : 22 2010 196
 Jurusan : Akuntansi
 Bidang Skripsi : Akuntansi Sektor Publik
 Judul : Pengukuran Kinerja dengan Menggunakan Metode *Value For Money* pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Empat Lawang

TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLFH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DI PERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDAH

No	Nama Dosen	Jabatan	Tanggal Persetujuan	Tanda Tangan
1	M.Fahmi, SE., M.Si	Pembimbing	11/9-2014	
2	H.M.Basyaruddin, Se., Ak M.Si	Ketua Penguji	10/9-2014	
3	Hj. Ida Zuraidah, SE., M.Si	Penguji I	9/9-2014	
4	M.Fahmi, SE., M.Si	Penguji II	8/9/2014	

Palembang, September 2014

Mengetahui
a.n. Ketua Program Studi Akuntansi



(Kosajina Ghazali, SE., Ak. M.Si)

NIM. 0228115802/1021961

BIODATA PENULIS

Nama : Sri Megawati

Nim : 22 2010 196

Tempat, Tanggal Lahir : Pagaralam, 25 Januari 1993

Agama : Islam

Nama Orang Tua :

a. **Ayah** : Guntoro

b. **Ibu** : Neta Noviani

Pekerjaan Orang Tua :

a. **Ayah** : Wirausaha

b. **Ibu** : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Kmp. Rejo Sari, Rt. 03, Rw. 01, Kelurahan Besemah

Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

SERTIFIKAT

171/J-10/FEB-UMP/SHA/VII/2014

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DI BERIKAN KEPADA :

NAMA : SRI MEGAWATI
NIM : 222010196
JURUSAN : Akuntansi



Yang dinyatakan **LULUS** Membaca dan Hafalan Al - Qur'an
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan Predikat **MEMUASKAN**

Palembang, 7 Juli 2014

an. Dekan
Wakil Dekan IV




Drs. Antoni, M.H.I.

DAFTAR NILAI

NAMA : SRIMEGAWATI

NIM : 22.2010.196

NO	NAMA SURAT	SKOR NILAI
1	AL -FAJR	75
2	AL-BALAD	70
3	ASY-SYAM	70
4	AL-LAIL	70
5	AD-DHUHA	70
6	AL-INSYIRAH	90
7	AT-TIN	80
8	AL-ALAQ	80
9	AL-QADAR	85
10	AL-BAIYINAH	80
11	AL-ZALZALAH	80
12	AL-ADIYAT	80
13	AL-QORI'AH	90
14	AT-TAKASUR	90
15	AL-ASHR	90
16	AL-HUMAZAH	90
17	AL-FIL	90
18	QURAI SY	90
19	AL-MA'UN	90
20	AL-KAUTSAR	90
21	AL-KAFIRUN	90
22	AN-NASHR	90
23	AL-LAHAB	90
24	AL-IKHLAS	90
25	AL-FALAQ	90
26	AN-NAS	100
NILAI RATA - RATA		85

PREDIKAT = MEMUASKAN